



**PERKEMBANGAN PERS DALAM KAITANNYA DENGAN
PERKEMBANGAN POLITIK DI SEMARANG
TAHUN 1912-1930**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
Universitas Negeri Semarang

Nama : Saydah Akla
NIM : 3101402025
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abu Su'ud
NIP. 130285582

Dra. Ufi Saraswati, M.Hum
NIP. 131876209

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah

Drs. Jayusman, M.Hum
NIP.131764053

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji skripsi

Prof. Drs.Hartono Kasmadi, M.Sc
NIP. 130 324 047

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr.H. Abu Su'ud
NIP. 130 285 582

Dra.Ufi Saraswati,M.Hum
NIP. 131 876 209

Mengetahui
Dekan,

Drs. Sunardi, M.M
NIP. 130 367 998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2007

Saydah Akla
NIM. 3101402025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ~ “Jas Merah” Jangan Lupakan Sejarah (Soekarno)
- ~ Tem'pora mutan'tur et nus muta'mur in il'is (waktu berubah dan kita juga ikut berubah)
- ~ Aku memiliki tetapi tidak dimilliki (Aristippus)

PERSEMBAHAN

1. Untuk ibuku, aku ingin senyumku menjadi bagian dari senyum ibuku dan air mataku senafas dengan air mata ibuku.
2. Untuk keluarga besarku tercinta, yang telah memberikan dukungan baik materi maupun spirit.
3. Untuk sahabat-sahabatku, *To Voglio Bene*
4. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2002, senasib seperjuangan.
5. Jurusan Sejarah tercinta
6. Almamaterku

SARI

Saydah Akla, 3101402025, 2007. *Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik Di Semarang Tahun 1912-1930*. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 116 + halaman depan.

Kata Kunci: Perkembangan, Pers, Politik.

Perkembangan pers berjalan sejajar dengan ekspansi yang dilakukan oleh Belanda. Pers mulai berkembang menjadi sarana organisasi sejalan dengan derap pergerakan kebangsaan di Indonesia. Semarang merupakan kota kehidupan politik yang penting, dimana kegiatan politik yang ada memberi warna wajah pada surat kabar, baik surat kabar belanda, Melayu-Tionghoa, maupun surat kabar pribumi. Pers menjalankan fungsinya sebagai media politik yaitu menyiarkan berita politik, melakukan propaganda dengan melayani politik tertentu, melakukan kritik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusunlah skripsi yang berjudul “Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik Di Kota Semarang tahun 1912-1930”.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan pers di Semarang antara tahun 1912-1930, bagaimana kebijakan pers yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912-1930, serta bagaimana perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang tahun 1912-1930? Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pers di Semarang, mengetahui kebijakan pers yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, dan untuk mengetahui perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang pada tahun 1912-1930.

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di kota Semarang dengan batasan waktu antara 1912-1930. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Sejarah (Historical Method), dimana penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) heuristik, (2) melakukan kritik sumber, (3) melakukan interpretasi, dan (4) penulis melakukan pengkajian dalam bentuk karya sejarah yang disusun secara kronologis dan tematis (Historiografi).

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut, pers mula-mula muncul dikota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang. Semarang menjadi salah satu kota berkembangnya berbagai surat kabar, dimana pada awal pertumbuhannya merupakan surat kabar yang mendukung kegiatan perdagangan. Kesadaran berpolitik yang lahir dengan munculnya organisasi-organisasi pribumi berhaluan politik membawa perkembangan pers yang juga secara tegas berpolitik dengan melayani kepentingan organisasi politik tertentu. Pemerintah mulai membuat kebijakan mengenai pers, seiring dengan tumbuhnya surat kabar. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan pasal-pasal bersifat karet untuk menjerat kaum pergerakan yang dianggap melanggar undang-undang pers.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa lahirnya kesadaran politik akhir 1912 yang ditandai dengan munculnya organisasi pribumi yang secara tegas berpolitik seperti IP dan SI, mendorong pertumbuhan pers sebagai media organisasi dalam melakukan kegiatan politik.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik Di Semarang Tahun 1912-1930”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sejarah, program S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Terimakasih yang tulus disampaikan kepada:

1. Prof. Dr.H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si selaku rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, M.M selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, terimakasih.
3. Drs. Jayusman, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah, terimakasih atas segala yang diberikan pada Jurusan Sejarah ini.
4. Prof. Dr. H. Abu Su’ud selaku pembimbing I dan Dra. Ufi Saraswati, M.Hum selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, motivasi dan saran-sarannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan juga beliau tak akan pernah terlupakan.
5. Ibuku tercinta yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan motivasi, terimakasih.

6. Teman-teman Sejarah angkatan 2002 (khususnya Suprihati, Jariyah, Setyowati, Zulfarida) yang telah memberi dukungan dan motivasinya, terimakasih.
7. Terimakasih juga disampaikan pada Perpustakaan Nasional, Monumen Pers, dan Suara Merdeka yang telah mempermudah proses penelusuran surat kabar.
8. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih.

Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan segala yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan hasil skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Semarang,

2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II	SEJARAH PERKEMBANGAN PERS DI SEMARANG (1912-1930)	
	A. Keadaan Geografis dan Penduduk Kota Semarang	21
	B. Keadaan Ekonomi-Politik-Sosial dan Budaya Kota Semarang	24
	C. Sejarah Munculnya Pers di Indonesia	32
	D. Perkembangan Pers di Semarang	
BAB III	KEBIJAKAN PERS PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI SEMARANG (1912-1930)	
	A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Pers.....	
	B. Pengawasan Bersifat Preventif Dan Represif	41
	C. Peraturan Bersifat Karet Dan Pers Breidel Ordonantie.....	45
BAB IV	PERKEMBANGAN PERS DALAM KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN POLITIK DI SEMARANG (1912-1930)	
	A. Kegiatan Politik di Semarang.....	
	B. Pers dan Kegiatan Politik di Semarang.....	57
	C. Sikap Kaum Pergerakan Terhadap Kebijakan Pers Pemerintah Belanda.....	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	83
	B. Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	DAFTAR SINGKATAN	93
	LAMPIRAN.....	94

DAFTAR SINGKATAN

- SM : Selompret Melajoe
- DT : Djawa Tengah
- SD : Sinar Djawa
- SH : Sinar Hindia
- GB : Goentoer Bergerak
- DB : Doenia Bergerak
- TH : Tionghoa
- VSTP : Vereeniging Voor Spoor en Tramweg Personeel
- SI : Sarekat Islam
- NIP : Nasional Indische Partij
- ISDV : Indische Sociaal Democratis Vereeniging
- PPKB : Persatuan Perkumpulan Buruh Hindia
- SS : Staats Spoor

DAFTAR TABEL

1. Pertumbuhan Penduduk Semarang Antara Tahun 1850-1941 (dalam ribuan).....	22
2. Angka Kematian Penduduk Semarang per 1000 Jiwa Tahun 1917.....	24
3. Ekspor Hasil Perkebunan Penting yang Melalui Pelabuhan Semarang Tahun 1900-1929 (dalam ton).....	27
4. Hasil Bea Cukai Semarang Tahun 1916-1925 (dalam ribuan)	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kabar dan Majalah yang Terbit di Semarang Tahun 1845-1930.....	96
2. Surat Kabar Politik di Semarang	97
3. Surat Kabar di Semarang Antara Tahun 1810-1984.....	98
4. Undangan Menghadiri Rapat Umum	101
5. De Locomotief dan Warna Warta Terbit Satu Halaman	102
6. Betoel Persdelict.....	103
7. Marco Contra Drukkerij Insulind.....	105
8. Pendahoeloean dan lain-lain	107
9. Hal Kritiek	108

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Contoh Surat Kabar yang Terbit di Semarang	109
2. Gambar Semaoen	112
3. Gambar Mas Marco Kartodikromo.....	113
4. Gambar Gedung Percetakan van Dorp Tahun 1858 dan 2007.....	114
5. Gambar Lokasi Penelitian.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian *pers* dalam bahasa Belanda, berasal dari bahasa latin *pressare* yang berarti tekan atau cetak. *Pers* dalam perkembangan selanjutnya diartikan sebagai media massa cetak (printing media). Istilah *pers* yang diambil dari bahasa Belanda biasa dipakai untuk surat kabar atau majalah (Masduki,2003:7).

Perkembangan *pers* berjalan sejajar dengan ekspansi bertahap yang dilakukan oleh Belanda, berawal dari kedatangan bangsa tersebut di Nusantara. Kongsi dagang *Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie* (VOC) menyadari bahwa *pers* berguna untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintah, sejak itulah sejarah *pers* di Indonesia berkembang (Adam,2003:2).

Pers mula-mula muncul di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya yang merupakan kota pelabuhan pusat lalu lintas pengapalan hasil pertanian. Sebagai kota pelabuhan maka cenderung menarik perhatian saudagar dan pedagang berbagai bangsa, sehingga kebutuhan para pedagang tersebut untuk memasarkan komoditas mereka, mengetahui harga pasar terakhir, mengetahui mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal dan benda pos dapat diketahui dari keberadaan *pers*.

Semarang merupakan kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang sama ramainya dengan Batavia dan Surabaya. Semarang menjadi pusat industri surat kabar

yang penting, bersaing ketat dengan Surabaya dan Batavia pada pertengahan abad ke-19 dalam menerbitkan surat kabar terkemuka berbahasa Belanda dan Melayu. Jumlah penduduk yang relatif besar di Semarang serta watak urban dan komersial menyebabkan bisnis surat kabar menggiurkan para penerbit dan pemilik usaha percetakan (Adam,2003:11).

Sekolah-sekolah yang ada di pusat-pusat kota dan dibangunnya sarana komunikasi modern seperti pos, telegraf, dan telepon juga merupakan sendi-sendi yang memperkokoh kehidupan persuratkabaran pada umumnya (Yuliati,2000:61).

Semarang mulai dikuasai oleh VOC pada tahun 1678, yaitu ketika diadakan perjanjian antara VOC dan Amangkurat II untuk memberantas pemberontakan Trunojoyo seorang pangeran dari Madura. Perjanjian itu berisi tentang pengakuan VOC terhadap kedaulatan Amangkurat II. Dalam perjanjian tersebut VOC juga mendapat pelabuhan Semarang dan sekitarnya. Sejak itu VOC mulai menguasai kota Semarang dan mulai merencanakan program perbaikan dan perluasan kota (Soerjosoempeno,1979:31).

Surat kabar mingguan pertama terbit di Semarang pada tahun 1845-1846 dengan nama *Semarangsch Advertentieblad* dan *Semarangsche Courant* (Smith,1983:6). Perkembangan surat kabar di Semarang didukung dengan dibangunnya sarana komunikasi dan transportasi yaitu dengan memasang *electromagnetische telegrafen*, telegram antara Batavia-Buitenzorg (Bogor) pada tahun 1855 (Joe,2004:151). Pembuatan jalan kereta api pada tahun 1864 dengan stasiun pertamanya di Tambak Sari, Semarang.

Undang-undang pers diumumkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1856. Undang-undang pers sesungguhnya bertujuan mengekang pers yang baru bangkit.

Pemerintah Belanda merancang undang-undang tersebut untuk melumpuhkan kritik terhadap pemerintah kolonial melalui cara-cara preventif dan represif (Adam,2003: 24).

Lahirnya undang-undang pers inilah, yang merangsang tumbuhnya pers berbahasa anak negeri di Indonesia. Banyak surat kabar berbahasa anak negeri terbit sejak undang-undang pers 1856 diumumkan. Seiring dengan perubahan sistem politik yang berlaku, peraturan perundang-undangan demi perundang-undangan datang silih berganti berisi aturan yang membatasi bahkan melenyapkan kebebasan pers (Harahap,2000:113).

“Medan Priyayi” merupakan pelopor surat kabar nasional yang dipimpin oleh R.M. Tirta Adisuryo. Surat kabar pribumi yang pertama di Semarang adalah *Sinar Hindia* yang menjadi organ *Sarekat Islam*. Surat kabar kaum pribumi lainnya adalah *Daja Oepaja* dibawah pimpinan Syamsuedin Soetan Makmoer (Muhamad,1995:288).

Nasionalisme dan sikap penjajah merupakan isue sentral gerakan kebangsaan melalui media massa dalam tahun 1900-an. Ide-ide kebangsaan nasionalisme tidak hanya tersebar melalui koran pribumi saja, namun juga pada koran Melayu-Tionghoa. Surat kabar *Mata Hari* dan *Soeara Semarang* pimpinan Mr.John dan Tan Boen Swan merupakan salah satu koran Melayu-Tionghoa (Muhamad,1995:288).

Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai Sumatra Selatan pada tanggal 14 Februari 1942, dan mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret dini hari. Letnan Jendral Ter Poorten panglima tentara Hindia Belanda (KNIL) menyerah atas nama seluruh angkatan perang sekutu di Jawa kepada Jepang dalam waktu delapan

hari (Kahin,1995:129). Pada masa pendudukan Jepang terbit surat kabar *Sinar Baru* yang dipimpin oleh Ghafar Ismail (Muhamad,1995:288)

Semarang merupakan kota kehidupan politik yang penting dimana *Indische Partij* dan *Sarekat Islam* mempunyai banyak pengikut. Golongan penduduk Tionghoa menunjukkan kesadaran politiknya setelah Dinasti Manchu tumbang pada tahun 1911. Iklim kehidupan politik di Semarang memberi warna wajah surat kabar di Semarang baik surat kabar Belanda, Melayu-Tionghoa maupun pers Bumi Putra.

Pers sebagai lembaga sosial dan media massa memiliki potensi dan efek dalam bidang sosial dan politik sangat besar sebagaimana terlihat dalam awal sejarah pers di dunia barat. Pengaruh yang mungkin diakibatkan oleh pers membuat penguasa otoriter dan kolonial, serta politisi bermodal besar maupun yang tidak bermodal bersaing ketat. Para pejuang kemerdekaan dan politisi dinegara bekas jajahan (Indonesia) telah memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan (Arifin,1992:16).

Pers dapat melakukan fungsi dan peranannya dalam komunikasi politik sesuai dengan kepentingan yang berlaku dimana pers itu sendiri lahir dan berkembang. Pers sebagai lembaga sosial memiliki ketergantungan dengan masyarakat, sehingga fungsi dan peranannya dalam kehidupan sosial ditentukan oleh sistem sosial politik yang berlaku dinegara dimana pers itu beroperasi. Menurut Merrill, sistem pers merupakan pencerminan sistem politik yang ada di negara yang bersangkutan (Arifin,1992:17).

Hal-hal diatas memberi uraian singkat mengenai pers pada masa sebelum kemerdekaan. Selama ini belum banyak tulisan yang memuat tentang perkembangan

pers zaman sebelum kemerdekaan. Kenyataan tersebut mendorong diadakannya penelitian lebih lanjut dengan tema “Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik di Semarang”.

Buku *Semaoen Pers Bumi Putra dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang* karya Dewi Yuliati merupakan salah satu buku yang mengungkap surat kabar di Semarang yaitu *Sinar Hindia* yang merupakan alat perjuangan partai *Sarekat Islam* Semarang, namun buku ini hanya memuat salah satu surat kabar di Semarang yang digunakan sebagai wahana politik. Buku ini merupakan salah satu latar belakang perlunya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan pers di Semarang pada zaman kolonial Belanda. Sebagai warga kota Semarang sudah seharusnya untuk meneliti perihal berkaitan dengan kota Semarang yang belum banyak diungkap.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan pengkajian dengan judul: *Perkembangan Pers Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Politik Di Semarang Tahun 1912-1930*.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pers antara tahun 1912-1930 di Semarang?
2. Bagaimana kebijakan pers yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912-1930 di Semarang?
3. Bagaimana perkembangan pers antara tahun 1912-1930 dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pers di Semarang antara tahun 1912-1930.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pers yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1912-1930 di Semarang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik antara tahun 1912-1930 di Semarang.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini yaitu:

- a. Memberi pengetahuan tentang perkembangan pers antara tahun 1912-1930 di Semarang.
- b. Memberi pengetahuan tentang kebijakan pers yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1912-1930 di Semarang.
- c. Memberi pengetahuan tentang perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik antara tahun 1912-1930 di Semarang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk mempersempit dan memudahkan dalam penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup spatial dan ruang lingkup temporal, yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Spasial (tempat)

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah kota Semarang yang terletak di pantai utara Jawa, yang sekarang menjadi ibukota Jawa Tengah mencakup kota dan kabupaten. Pada zaman pendudukan Belanda Semarang adalah kota pelabuhan dan perdagangan, dimana Bisnis surat kabar menarik bagi para penerbit dan pemilik percetakan di Semarang karena jumlah penduduknya yang relatif besar dan komersial (Adam,2003:11).

b. Ruang Lingkup Temporal (waktu)

Dalam penelitian ini ruang lingkup waktunya adalah antara tahun 1912-1930, tahun 1912 merupakan batasan awal dalam penelitian ini. Pada tahun 1912 pers di Semarang mengalami perubahan fungsi yaitu menjadi media pergerakan nasional, perubahan tersebut merupakan dampak berdirinya partai-partai yang berorientasi politik diantaranya yaitu *Indische Partij* dan *Sarekat Islam*. Keberadaan kedua partai tersebut secara tidak langsung merangsang tumbuhnya partai politik lain, sehingga memberikan nuansa dalam iklim perpolitikan di Semarang.

Penelitian ini dibatasi pada hingga tahun 1930, yaitu pada saat kegiatan partai politik mengalami krisis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 menyebabkan pemerintah Belanda bertindak lebih keras terhadap setiap kegiatan partai politik. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan pembatasan berkumpul dan berserikat, sehingga banyak para nasionalis diantaranya Soekarno, Hatta, dan Syahrir diasingkan. Partai-partai yang ada pada masa itu

terpaksa mengurangi sikap kerasnya terhadap pemerintah Belanda (Moedjanto,1991:57-58).

Adapun istilah yang di tegaskan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pers

Secara etimologis *Pers* diambil dari bahasa Inggris *press* atau bahasa Belanda *pers* yang berasal dari bahasa latin *pressare* berarti tekan atau cetak, dalam perkembangan selanjutnya pers diartikan sebagai media massa cetak.

Pers dalam arti luas yaitu mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan, menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Pers hanya digolongkan pada semua produk penerbitan yang melewati proses percetakan dalam artian sempit, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak (Rahmadi,1990:9-10).

Pers juga diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum, terbit, teratur dilengkapi atau tidak dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan dll (Koesworo,1994:05).

Menurut Arifin pengertian pers di Indonesia yaitu sebagai lembaga kemasyarakatan sekaligus sebagai alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, di perlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat

milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Pers adakalanya menjalankan fungsinya sebagai media politik yang berfungsi untuk menyiarkan berita-berita politik, melakukan propaganda politik, melakukan kritik dan kontrol dengan melayani politik tertentu seperti dalam pemberitaan surat kabar *Fikiran Rakyat* terbitan tahun 1932 halaman 6 yang terbit di Bandung. “*Dinegeri jang tidak merdeka adalah soerat-soerat kabar mendjadi pembantoe atau sendjata dari kaoem pergerakan dan djoega dari kaoem reactieonernja. Pembantoe bagai kaoem pergerakan oleh karena ia bisa toeloeng menjebarkan atau mempropagandakan tjita-tjita dari kaoem pergerakan pada ra'jat jang banjak, bisa menjadi penjoeloeh bagai kaoem Marhaen*”.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pers adalah pada apa yang disebut sebagai media cetak khususnya “surat kabar”. Penelitian ini lebih menekankan pada perkembangan pers dari tahun 1912-1930 (Zaman kekuasaan pemerintah Belanda). Sedangkan perkembangan politik yang ada hanya sebuah prolog yang keberadaannya juga tidak diabaikan untuk mengetahui bagaimana kondisi politik yang ada mewarnai pemberitaan pers di Semarang.

2. Politik

Secara etimologis *politik* berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*. *Polis* berarti negara kota. Orang yang mendiami *polis* disebut *polites*. *Poletis* berarti warga negara. *Politikos* berarti kewarganegaraan. Dari istilah ini muncul *politike*

techne yang berarti kemahiran politik. *Politike episteme* berarti ilmu politik. Dari kata inilah kata *politik* yang kita gunakan saat ini berasal (Philipus,2004:89-90).

Menurut *Miriam Budiarjo* politik didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu (Budiarjo,2002:8).

Dalam komunikasi politik media massa sangat berperan menggambarkan cara-cara tertentu dalam mana seluruh proses politik terintegrasi dengan jaringan komunikasi sosial. Pada umumnya media massa itu sendiri mutlak bersifat politik atau padat dengan masalah politik.

Para pengkaji komunikasi politik membahas pers dan politik sebagai berikut: 1). Pers dipandang sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik (seperti dalam studi mengenai propaganda dan pendapat umum; 2). Pers memiliki ketergantungan dari kehidupan politik (seperti dalam studi mengenai pers dan pembrangusan pers). (Arifin, 1992:17)

Politik dalam penelitian ini adalah kegiatan politik yang terjadi antara tahun 1912-1930 yaitu sejak kemunculan partai politik pertama *Indische Partij*. Kegiatan politik yang ada pada masa ini lebih merupakan kegiatan dari kaum pergerakan nasional yang ingin mewujudkan Indonesia Merdeka.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, diperlukan suatu tinjauan pustaka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Tinjauan pustaka ini penting sebagai upaya menelusuri dan menelaah kepustakaan, sehingga dapat dipelajari serta merintis jalan dan kerangka pemikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya tinjauan pustaka yang dilakukan, ini sedikit banyak dapat memberi pengarahannya sewajarnya dalam membuat karya ilmiah seperti membuat skripsi.

Menurut Rahmadi dalam bukunya *Perbandingan Sistem Pers*, pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua pers sebagai lembaga masyarakat, institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah dari padanya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana pers di Semarang mempengaruhi dan dipengaruhi iklim perpolitikan yang berkembang di Semarang (Rahmadi,1990:10).

Buku *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* diterjemahkan oleh Amarzan Loebis dari disertasi Ahmat Adam. Buku ini menjelaskan mengenai latar belakang sejarah munculnya pers di Indonesia, mulai awal kedatangan percetakan di Indonesia, kemudian muncul Koran berbahasa Belanda hingga diumumkannya undang-undang pers. Kemudian dijelaskan lebih rinci tentang meunculnya pers berbahasa anak negeri (pribumi) yang mendorong tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia.

Buku ini juga menjelaskan mengenai latar belakang munculnya kesadaran politik di Indonesia, organisasi politik pertama dipelopori oleh *Indische Partij*. Lebih rinci lagi dijelaskan mengenai perkembangan dua organisasi politik di Indonesia yaitu *Indische Partij* dan *Sarekat Islam*.

Menurut Adam buku ini berkisar pada lima tema utama yaitu pertama, menunjukkan bahwa pers merupakan sebuah produk sampingan usaha orang Eropa di bidang budaya dan ekonomi yang bermula pada masa awal VOC pada abad ke-17. Kedua, mencoba menunjukkan bahwa perkembangan pers didorong oleh motif-motif ekonomi, sosio-kultural dan misionaris. Ketiga menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pers merupakan produk lingkungan urban dengan sejumlah sekolah, infrastruktur dan komunikasi modern termasuk khususnya – *Lingua Franca* yakni ragam bahasa Melayu rendah dan Melayu pasar. Keempat, proses modernisasi mendorong perkembangan pers yang memacu pertumbuhan intelektual dikalangan orang Indonesia yang lambat laun ingin sekali menandingi orang Eropa dan Tionghoa dalam meraih modernitas dan kelima, perkembangan intelektual ini pada gilirannya merangsang orang Indonesia mendirikan pers sendiri serta membangun organisasi sosial-ekonomi, keagamaan dan politik (Adam,2003:xxiii-xxiv).

Semaon Pers Bumi Putra dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang, buku karangan Dewi Yulianti menjelaskan mengenai kota Semarang yang dijadikan sebagai basis pertumbuhan pers liberal, sebagai dampak munculnya liberalisme di Belanda. Hal tersebut mengakibatkan dilaksanakannya konstitusi baru yang lebih demokratis pada tahun 1848 dan memberi pengaruh dalam perkembangan pers di Hindia

Belanda. Sistem liberal ini membuka peluang bagi para pengusaha swasta di Hindia Belanda bergerak dalam bisnis persuratkabaran (Yuliati,2000:59).

Perkembangan surat kabar *Sinar Djawa-Sinar Hindia* sebagai koran yang menjadi wadah pergerakan Sarekat Islam Semarang diungkap secara detail dalam buku ini. Berbagai masalah penghambat pergerakan rakyat diulas dan dikritik secara terang-terangan dalam surat kabar tersebut. Dijelaskan juga mengenai peraturan pemerintah kolonial Belanda mengenai pers dan bagaimana tokoh-tokoh Sarekat Islam khususnya Semaun menanggapi peraturan tersebut.

Buku ini mengkaji sumber sejarah periode tiga dekade pertama abad ke-20 yang memiliki keunikan dalam periode sejarah Indonesia. Awal abad ke-20 ini merupakan periode kolonial yang mengalami perubahan, ditandai dengan pembaruan kebijakan politik baru di tanah jajahan yaitu dari politik liberal (1870-1900) ke politik etis. Gelombang perubahan juga terjadi dalam masyarakat Indonesia ditandai dengan lahirnya kebangkitan nasional.

Buku *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* terbitan PT Kompas Media Nusantara, menguraikan tiga bentuk pers di Indonesia yaitu Pers Belanda, Melayu-Tionghoa dan Pers Indonesia. Mengenai perkembangan pers Belanda diuraikan usaha-usaha pertama mendirikan percetakan dan penerbitan pers serta perkembangannya sampai akhir Hindia Belanda.

Pada awal abad-20 beberapa pers Belanda mewakili orientasi politik tertentu yang bercorak mempertahankan hubungan kolonial di Indonesia. Pers Melayu-Tionghoa merupakan usaha bisnis yang memuat suara golongan Tionghoa, dimana

golongan tersebut lebih suka pasang iklan di surat kabar mereka (Surjomiharjo,2002:6-7).

Pers Indonesia menguraikan pers daerah dan berbahasa Melayu, mengalami perkembangan sejak berdirinya organisasi-organisasi yang mempunyai media persnya sendiri. Pers Indonesia memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat kolonial dan membela kepentingan tujuan pergerakan nasional.

Peraturan pemerintah Belanda mengenai Pers yang dituangkan dalam Undang-undang tahun 1856 mengenai barang-barang cetak dan diperbaharui tahun 1906 dimana keduanya terdapat perbedaan yaitu yang pertama bersifat pengawasan preventif sedangkan yang kedua bersifat pengawasan represif. Dua puluh lima tahun kemudian pemerintah kolonial menetapkan Undang-Undang yang dikenal sebagai Pers Breidel Ordonnantie (7 September 1931). Disamping itu ada “pasal-pasal karet” dalam undang-undang hukum pidana yaitu pasal-pasal yang berhubungan dengan tuduhan melakukan kejahatan melanggar ketertiban umum.

Riwayat Semarang karangan Liem Thian Joe merupakan buku yang digunakan penulis untuk menjelaskan kegiatan politik etnis Tionghoa di Semarang. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Liem Thian Joe yang dimuat dalam koran Semarang Djawa Tengah Review, berita yang dimuat bersumber dari arsip Kongkoan. Secara detail dijelaskan mengenai keadaan kota Semarang dalam kurun waktu 1416-1931. Periode tersebut sesuai dengan kurun waktu yang diambil dalam penelitian ini yaitu 1912-1930, sehingga keadaan mengenai kota Semarang yang dijelaskan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini lebih

menyoroti mengenai kegiatan orang-orang Tionghoa di Semarang, diantaranya mengenai kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1933 (cetakan pertama) dan diperbarui lagi pada tahun 2004, tahun penerbitan buku mendekati tahun terjadinya peristiwa sehingga kebenaran dari isi buku tersebut dapat dipercaya.

Sejarah Daerah Djawa Tengah karangan Moh.Oemar,dkk. menjelaskan mengenai keadaan daerah Djawa Tengah secara umum. Buku ini memberi gambaran mengenai pemerintahan di Jawa Tengah dari masa pra-sejarah hingga masa setelah kemerdekaan. Buku ini memberi informasi mengenai keadaan politik di Jawa Tengah pada tahun 1900-1940, dan organisasi yang ada di Semarang seperti *Budi Utomo*, *Indische Partij*, *Sarekat Islam*, *Partai Nasional Indonesia*, *Partai Bangsa Indonesia*, serta *Partai Indonesia*.

Untuk memperdalam mengenai kondisi politik di kota Semarang penulis menggunakan buku *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V* karangan Marwati dan Nugroho, serta buku *Sejarah Modern Indonesia* karangan M.C.Ricklefs. Kedua buku tersebut menjelaskan secara detail mengenai perkembangan politik daerah Jawa dalam kurun waktu 1900-1942, serta organisasi-organisasi politik yang ada dalam periode tersebut.

Masing-masing buku diatas punya relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Baik dalam pembahasan tentang perkembangan politik, perkembangan pers, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda, maupun mengenai keterkaitan antara perkembangan pers dan politik yang ada di kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Sejarah merupakan studi untuk memperoleh makna baru bagi masa kini dari data-data masa lampau, namun karena keterbatasan data-data yang diperoleh untuk bisa direkonstruksikan, maka diperlukan suatu metode yang tepat dalam membaca dan menganalisa data-data masa lalu tersebut, yakni yang disebut dengan metode penelitian sejarah (Gottschalk, 1986: 18-19).

Studi tentang perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang ini merupakan analisa kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa pemerintahan Belanda, maka untuk merekonstruksi masa lampau tersebut digunakan pendekatan historis dalam penelitiannya. Studi ini mengarah pada penggunaan empat metode dasar penelitian sejarah, yakni Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi yang penggunaannya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya, yakni studi literatur.

Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah yaitu:

a. Heuristik

Pengumpulan jejak-jejak masa lampau dalam tahap ini, menggunakan satu sumber yaitu sumber tertulis, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dengan mengkaji buku-buku yang memuat peristiwa yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan bahan-bahan dokumen seperti arsip ataupun surat kabar. Pencarian data-data ini diarahkan untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan perkembangan surat kabar di Semarang, kebijakan pers yang dibuat oleh

pemerintah kolonial Belanda, dan perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang antara tahun 1912-1930.

Sumber-sumber yang didapatkan kebanyakan merupakan sumber sekunder yang didapatkan dari buku-buku referensi yang didapat dari beberapa tempat yaitu Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Jurusan Sejarah FIS UNNES, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Semarang, Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah. Sedangkan sumber primer yang diperoleh berasal dari surat kabar koleksi Perpustakaan Nasional.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan dengan dua tahap yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik terhadap sumber yang bertujuan menilai apakah isi sumber dapat dipercaya atau tidak. Sebelum dijadikan landasan penelitian dilakukan kritik intern buku sumber yang ditemukan dengan langkah sebagai berikut: 1). Melihat kandungan data dari masing-masing sumber, apakah sumber yang diperoleh data-datanya relevan dengan permasalahan atau tidak, 2). Menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang peneliti tetapkan, dan 3). Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil penelitian, pengamatan, observasi, laporan perjalanan ataukah tulisan pelaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah isi buku tersebut layak dijadikan landasan dalam penelitian atau tidak.

Masing-masing buku tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam penelitian skripsi ini ditemukan buku-buku yang layak

dijadikan landasan yaitu sebagai berikut, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesian* karangan Ahmat Adam yang diterjemahkan oleh Armazan Loebis, *Semaoen Pers Bumi Putra dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang* karangan Dewi Yuliati, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia* karangan Surjomiharjo, *Riwayat Semarang* karangan Liem Thian Joe. Sumber yang diperoleh dibandingkan dengan surat kabar maupun literatur yang menunjang. Perbandingan sumber dilakukan untuk memperoleh data sesuai kajian.

Kritik ekstern yaitu kritik yang menilai kebenaran sumber atau data sejarah dari luar. Dilihat dari bentuknya apakah sumber itu asli atau turunan, yaitu dengan melakukan langkah sebagai berikut: 1). Melakukan *cross check* data antar sumber yang berhasil dikumpulkan, 2). Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau mengarang apakah wartawan, ahli pengamat, praktisi, dosen, pelaku peristiwa ataupun institusi pemerintah dan swasta. Dengan memperhatikan hal itu maka peneliti bisa menyimpulkan apakah sumber tersebut dapat diyakini kebenarannya atau tidak. Dalam hal ini sumber-sumber yang didapat merupakan sumber sekunder, jadi bukan merupakan sumber asli. Dalam penelitian ini buku sumber yang datanya dinilai dapat dipercaya kebenarannya ialah buku *Riwayat Semarang* karangan Liem Thian Joe. Buku ini ditulis mendekati tahun peristiwa yaitu 1933, sehingga kebenaran datanya dapat dipercaya. Surat kabar yang tumbuh pada periode penelitian, antara tahun 1912-1930 merupakan sumber primer untuk melakukan *crozz chek data*. Surat kabar yang menjadi sumber

dalam penelitian ini yaitu : Sinar Djawa, Goentoer Bergerak, Djawa Tengah, dan Si Tetap.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu langkah yang ditempuh untuk merangkai data-data atau sumber-sumber sejarah yang telah kita peroleh menjadi suatu kesatuan yang bermakna. Bertujuan supaya data atau sumber yang ada mampu mengungkap permasalahan yang ada.

Dalam proses interpretasi, diperoleh data-data yang sesuai dengan kajian permasalahan. Data-data yang diperoleh selama penelitian, tidak semuanya dimasukkan dalam pembahasan permasalahan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan permasalahan yang hendak dijawab. Dalam hal ini telah dikumpulkan berbagai fakta mengenai perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang. Sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh, ternyata pers (surat kabar) berkembang sejalan dengan perkembangan politik di Semarang. Hal ini dapat dilihat dari munculnya surat kabar yang menjadi media organisasi di Semarang.

d. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode sejarah, yaitu penyajian karya sejarah yang disusun secara kronologis, tematis sehingga dihasilkan karya sejarah yang ilmiah. Penulisan hasil penelitian sejarah menurut Gottschalk (1975:131) harus memenuhi empat hal yaitu memuat detail faktuil yang akurat, kelengkapan bukti yang cukup, struktur yang logis, penyajian yang terang dan halus. Penulisan hasil penelitian ini merupakan hasil interpretasi

penulis dari data-data yang telah dikritik, dan ditampilkan dalam suatu bentuk cerita sejarah yang didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga keberadaan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PERS DI SEMARANG (1912-1930)

A. Keadaan Geografis dan Penduduk Kota Semarang

Secara geografis Semarang terletak pada $110^{\circ},35'$ Bujur Timur tepatnya pada garis $6^{\circ}, 5'-7^{\circ}, 10$ Lintang Selatan dengan batas-batas sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Barat dengan kabupaten Kendal dan sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang. Suhu udaranya berkisar antara $20-30^{\circ}$ C dan suhu rata-rata 27° C. Kota Semarang memiliki luas $373,70$ Km (TIM,2004:1).

Topologi wilayah kodya Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan daerah perbukitan. Di bagian Utara merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0-2% sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-3,50M. di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 2-40% dengan ketinggian antara $9^{\circ}-27^{\circ}$ M (Krisniati,1997:1).

Perkembangan kota Semarang dimulai pada awal abad XV dibentuknya koloni dari komunitas muslim Tionghoa dan pribumi di muara Kaligarang, yang saat ini adalah daerah di kaki bukit Simongan. Bupati pertama Semarang adalah Kyai Ageng Pandan Arang yang diangkat pada tahun 1547 dan menempati kabupaten di kampung Bubakan (Soerjosoempeno,1979:6-26).

Semarang mulai dikuasai VOC pada tahun 1678, dan sejak itu mulai direncanakan program perbaikan dan perluasan kota. Semarang mulai menjadi pusat kegiatan politik VOC pada tahun 1708, ketika pemerintah Belanda memindahkan pertahanan militer dari Jepara ke Semarang (Krisniati,1997:8). Di

pusat kota berdiri kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor perdagangan dan pusat perdagangan yang dikelilingi oleh beberapa pemukiman yang dipisahkan sesuai asal-usul dan ras, terdapat pemukiman orang Eropa, orang Cina, serta kampung Melayu dan Jawa.

Semarang mulai menjadi Kota Praja (*Staads Gemmente Van Semarang*) pada tanggal 1 April 1906 yang diatur dalam *Staat blad* no.120 tahun 1906, sejak itu Semarang terlepas dari kabupaten dan memiliki batas kekuasaan pemerintah Kota Praja (Krisniati,1997:13). Arah pembangunan kota Semarang bertujuan untuk membangun pemukiman Belanda yang dilengkapi dengan fasilitas dan otoritas kota antara lain: Stadion olah raga, Lapangan menembak, Taman kota, Jaringan jalan baru, Drainage banjir kanal timur dan barat, Siranda kanal dan pembangunan WC atau kamar mandi umum dan lain-lain.

Penduduk Semarang pada tahun 1905 tercatat berjumlah 96.000 jiwa, tahun 1906 berjumlah 100.000 jiwa, dan pada tahun 1929 meningkat menjadi 154.783 jiwa. Jumlah penduduk yang relatif besar di kota ini dengan ciri perdagangannya merupakan faktor pendukung lahirnya bisnis surat kabar (Yuliati,2000:61).

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Semarang antara tahun 1850-1941

(dalam ribuan)

Penduduk	1850	1890	1920	1930	1941
Pribumi	20.000	53.974	126.628	175.457	221.000
Orang Cina	4.000	12.104	19.720	27.423	40.000
Timur Asing	1.850	1.543	1.530	2.329	2.500
Eropa	1.550	3.565	10.151	12.587	16.500
Jumlah	29.000	71.786	158.036	217.796	280.000

Sumber: Brommer,1995:25

Faktor lain yang mendukung berkembangnya surat kabar di Semarang adalah dibangunnya sarana komunikasi modern seperti kantor pos pada tahun 1862, telegraf dan telepon pada tahun 1884, serta didirikannya sekolah-sekolah di pusat kota. Dengan berdirinya sekolah-sekolah, menunjukkan tingkat melek huruf semakin meningkat sehingga jumlah pembaca surat kabar juga meningkat.

Sekolah milik pemerintah di pulau Jawa pada periode 1849-1871 berjumlah 77, terjadi kenaikan jumlah murid disekolah menengah umum antara tahun 1910-1930 yang luar biasa di Indonesia. Tahun 1910 murid pribumi yang masuk ke sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), AMS (Algemeene Middelbare School), HBS (Hoogere Burgerschool) hanya berjumlah 500 orang kemudian meningkat menjadi 7.776 pada tahun 1930, jumlah tersebut belum termasuk murid yang masuk di sekolah swasta di Indonesia (Notosusanto,1984:130).

Penyakit pes mewabah di Semarang pada tahun 1917, dan meluas karena buruknya sanitasi perumahan rakyat. Masyarakat pribumi di kota Semarang sebagian besar tinggal di gang-gang gelap, sempit dan becek, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam ruangan rumah. Rumah orang-orang pribumi hanya bertembok anyaman bambo dan beratap ijuk atau rumbia yang menjadi sarang tikus pembawa wabah pes. Kekurangan makanan (nilai gizi rendah) serta tidak ada pemeliharaan tanah kesehatan masyarakat oleh pemerintah Hindia Belanda, menyebabkan angka kematian penduduk Semarang yang tinggi (Gie,2005:16).

Tabel 2 Angka Kematian Penduduk Semarang Per 1000 Jiwa tahun 1917

Daerah	Triwulan Pertama	Triwulan Kedua
Semarang Kulon	48	67
Semarang Kidul	32	57
Semarang Wetan	59	72
Semarang Tengah	45	49
Genuk	24	64
Pedurungan	26	90
Srondol	13	23
Mranggen	26	151
Karangun	24	115
Kebon Batu	20	98
Rata-rata	31.2	78.6

Sumber: Gie,2005:16

Keadaan yang menunjukkan kesengsaraan rakyat ini dikutip dari penelitian Gie mengenai Sarekat Islam Semarang tahun 1917-1920. Ia telah melakukan penelitian dengan melakukan penelusuran kliping-kliping koran dan wawancara autentik terhadap tokoh-tokoh sejarah yang masih ada diantaranya Semaoen dan Darsono.

B. Keadaan Ekonomi-Politik-Sosial dan Budaya Kota Semarang

Semarang sejak dulu sudah merupakan pelabuhan penting, hal ini dapat dilihat dari catatan yang dibuat oleh seorang portugis bernama Tome Pires, kurang lebih pada tahun 1513 ketika berlayar menyusuri pantai Utara Jawa terdapat tiga tempat yang dikunjungi oleh kapal-kapal pedagang antara lain Losari, Tegal, dan

Semarang. Disekitar tahun 1678 Cornelis Speelman mencatat ramainya pelabuhan Jepara melebihi pelabuhan Semarang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan pajak yang diperoleh pada tahun 1677 melebihi yang diperoleh dari pelabuhan Jepara. Pejabat-pejabat penting dan catatan yang berkaitan dengan perdagangan waktu itu, oleh pemerintah Belanda mulai dipindahkan ke Semarang (Tio,Tanpa angka tahun:8).

Orang-orang Tionghoa lebih unggul dalam hal perdagangan dan pertumbuhannya, dibanding pendatang-pendatang yang lain. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya kepala Tionghoa oleh pemerintah Belanda, untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan dan yang berhubungan dengan penguasa Belanda. Kapitan Der Chinesen yang terkenal di tahun 1672 adalah tuan Kwee Kiauw, seorang saudagar yang terkenal pada waktu itu (Tio,tanpa angka tahun:19).

Depresi agraris berlangsung di seluruh dunia pada tahun 1870-1894, harga gula dan kopi mengalami penurunan. Pada tahun 1877-1884 harga gula di daerah Jawa menurun dari F.19 menjadi F.9 per kilogram, harga kopi merosot sampai separuhnya. Dalam tahun ini penanaman gula dan kopi mengalami serangan hama dan penyakit, oleh karenanya pada tahun 1884 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat. Krisis tersebut dapat diatasi pada tahun 1900-an dengan meningkatnya produksi ekspor (Oemar,1994:157).

Hindia Belanda telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900, sehingga seluruh wilayah disatukan dibawah *Pax Neerlandica*

(Perdamaian Neerlandika). Dalam periode ini politik pemerintah Hindia Belanda mengalami pembaharuan yaitu dari politik liberal (1870-1900) ke politik etis.

Pembaharuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya “balas budi” atas jasa tanah jajahan terhadap negeri induknya dengan cara melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan (edukatif), pertanian (irigasi), dan kependudukan (emigrasi) untuk kemakmuran tanah jajahan (Ricklefs, 1991:227-246). Kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah Belanda membawa dampak perubahan di tanah jajahan. Salah satunya adanya *Pax Neerlandica* memberi manfaat memajukan lalu lintas antar daerah di Indonesia, daerah yang dahulu tidak dapat berhubungan dengan daerah luar menjadi terbuka

Sarana transportasi yang memadai bagi kota Semarang mulai dibangun seiring dengan perkembangan kota Semarang. Pembuatan jalan kereta api sepanjang 23 Km, merupakan yang dibuat pertama kali di Indonesia pada tahun 1864 dengan stasiun pertamanya di Semarang yaitu Tambak Sari. Trayek yang ditempuhnya mula-mula Semarang-Temanggung, pembukaannya dilakukan pada tahun 1867 untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari daerah *Vorstenlanden*.

De Nederlandsch Indische *Spororweg Maatschappij* (NIS) pada tahun 1889 mendirikan trem uap kota Semarang yang jalurnya menghubungkan Bulu-Jurnatan-Jomblang. Kemudian dibuka jalur Semarang-Ceribon oleh Semarang *Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS), *Jolana Stoomtram Matschappij* (SJS) dengan jalur Semarang-Kudus-Juwono-Lasem, dan *Dal Stroomtram Maatschappij* (SDS) jalur yang dilewati antara Wonosobo-Purwokerto. Dalam

satu dasawarsa SCS, SJS, SDS bergabung menjadi satu sehingga volume transportasi meningkat dua kali lipat (Krisniati,1997:10).

Semarang dalam perkembangan selanjutnya mempunyai sarana yang cukup berarti yaitu penerbangan. Maskapai penerbangan di Hindia Belanda KNILM (Koninlijke Nederlandch Indische Luchtvaart Maatschappij) didirikan pada tahun 1928. penerbangan pulang-pergi menggunakan F.VII antara Batavia dan Semarang yang lapangan terbangnya terletak di Simongan, sebelah Barat daya kota.

Pembangunan sarana transportasi menjadikan perdagangan di kota Semarang makin berkembang. Perkembangan tersebut di dukung dengan adanya jalan Anyer-Panarukan yang dibangun oleh Deandels pada tahun 1808-1811, jalur tersebut melalui kota Semarang, dan makin memperlancar pengambilan produk ekspor dari pedalaman menuju pelabuhan kota Semarang (Kasmadi,1985:26-27). Adapun beberapa produk yang diekspor dari pelabuhan Semarang adalah gula, coklat, kopra, biji buah jarak, kayu jati, gaplek, kacang tanah, kulit binatang, katun, kapas, kopi dan tembakau. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan meningkatnya jumlah ekspor hasil perkebunan di kota Semarang.

Tabel 3 Ekspor Hasil Perkebunan Penting yang Melalui Pelabuhan Semarang Tahun 1900-1929 (dalam ton)

Jenis Ekspor	1900	1913	1919	1928	1929
Gula	138.692	294.894	488.300	650.516	620.828
Tembakau	8.393	17.307	31.523	12.510	11.330
Kopi	4.423	1.909	6.688	3.860	2.676
Kapas	1.509	4.082	10.043	10.861	9.313
Jumlah	153.017	318.192	536.554	677.747	64.147

Sumber: Brommer,1995:28

Penduduk di pulau Jawa meningkat jumlahnya pada tahun 1900-an menyebabkan kemerosotan kesejahteraan. Pemerintah Belanda membentuk *Departemen Van Lanboub, Nijverheid en Handal* (Departemen pertanian, perindustrian dan perdagangan) pada tahun 1904 untuk mengatasi kemerosotan tersebut. Untuk menggalakkan industrialisasi pada bulan September 1915, gubernur jenderal Indenburg menyetujui dibentuknya komisi pengembangan industri yang bertugas memajukan industrialisasi di Hindia Belanda.

Industri pribumi yang tercatat pada tahun 1909 yaitu batik pewarna biru, pembuatan alat-alat logam, pembuatan periuk atau belangga dari tanah liat, kulit, pakaian, karet, dan pembuatan gong. Pertumbuhan industri pabrik di Semarang dapat dikatakan cukup pesat. Pada tahun 1907 di Semarang terdapat 22 jenis industri pabrik, pada tahun 1915 terdapat 25 jenis, pada tahun 1923 tercatat 36 jenis dan pada tahun 1925 ada 48 industri. Industri-industri Semarang pada periode tersebut sudah menggunakan mesin bertenaga air, uap, gas dan listrik di samping itu masih ada industri yang menggunakan tenaga manusia (*Hendernarbeid*), contoh industri sepatu, sadel dan lainnya (Yuliati, 1997:120).

Industrialisasi di Semarang pada awal abad ke-20 tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak swasta namun juga oleh pemerintah (*Gemmeente*). Pada umumnya pihak swasta menangani industri pengolahan (*manufacturing industri*), dan pemerintah bergerak pada sector utilities (listrik dan air bersih) konstruksi, transportasi dan komunikasi.

Gemmeente Semarang mengelola beberapa perusahaan yaitu perusahaan air bersih (1909), perusahaan pemadam kebakaran (1908), perusahaan listrik

(1913), kebersihan kota, pasar (pasar bugangan pada tahun 1955, pasar Djatingaleh pada tahun 1930, pasar Kagok tahun 1914, pasar Kintelan pada tahun 1916, pasar Sronдол pada tahun 1920, pasar hewan disebelah timur bugangan pada tahun 1915), toko dan restoran (1919-1920), trem kota (1921), dinas pemotongan hewan (1929) dan perumahan rakyat (Yuliati,1997:122).

Al Bagchus walikota Semarang periode 1927-1936 menyampaikan bahwa Semarang mempunyai kelebihan untuk menjadi kota Industri. Pertama, Semarang merupakan tempat pertemuan jalur-jalur kereta api NIS-SCS-SJS. Kedua, Semarang memiliki jalan darat yang dapat dilalui mobil yang menghubungkan tempat-tempat penting daerah pedalaman Jawa Tengah. Ketiga, di sekitar pelabuhan Semarang tersedia areal untuk mendirikan pabrik-pabrik. Keempat, terdapat banyak tenaga kerja dengan upah murah. Kelima, terdapat maskapai angkutan seperti kereta api, kapal, dan perahu. Keenam, pemimpin perusahaan dan karyawan dapat memperoleh perumahan yang dikehendaki. Ketujuh, warga kota atau pemerintah kota praja Semarang selalu siap menerima kehadiran industri baru diwilayahnya (Yuliati,1997:119).

Tumbuhnya industri di Semarang didukung adanya faktor lain yaitu adanya maskapai dagang, bank-bank, toko, pasar, industri, pers, telepon. Beberapa masakapai yang ada di Semarang antara lain: yaitu *Semarangsche Zee en Brandarsurantie Maatschappij* (1866), *Handel en Industri Maatschappij Mestfabriek Java* (1886), *Tweede Semarangsche Zee en Brandassurantie Maatschaappij* (1886), *Rijtuig Fabriek en Auto Handel Voorheen G.Barendse*

(1895), *Bouw Maatschaappij Liem Kim Ling* (1897), *Semarangsch Stoomboot en Prauwenveer* (1898), *Nijverheid en Handel Maatschaappij Insulinde* (1906).

Orderneming (perkebunan swasta) di karisidenan Semarang pada Tahun 1920 berjumlah 60 buah, kebanyakan ditanami dengan tanaman tebu, kopi, kina, coklat, nila, kapas, gula, sebuah prabrik tepung tapioka, 2 penggilingan padi, 4 perkebunan pembibitan tebu dan 5 pabrik karet milik pemerintah (Kasmadi, 1984/85:21).

Produksi tebu (gula) terus meningkat setiap tahunnya di kota Semarang, pada tahun 1900 produksi gula berjumlah 744.257, naik menjadi 1.319.087 ton pada tahun 1915, kemudian meningkat lagi menjadi 1.822.188 ton pada tahun 1917. dengan naiknya produksi gula, harga beras semakin meningkat dan diperhebat lagi dengan berkurangnya pengangkutan antara Indonesia dan negeri penghasil beras lainnya di Asia tenggara sebagai akibat perang dunia I. Harga beras Djawa no.1 seharga F.14 per pikul pada tahun 1918. Harga ini tidak terjangkau oleh rakyat yang berpenghasilan rendah. Surat kabar Sinar Hindia 14 Januari 1919 no.9 menyebutkan harga beras siam seharga F.16 per pikul, beras Djawa no.1 seharga F.16 per pikul, no.2 seharga F.15 per pikul, dan no.3 seharga F.14 per pikul (Yuliati, 2000:42-43).

Perluasan penanaman tebu di pulau Jawa dari tahun 1900 sampai 1930, mengakibatkan naiknya harga beras (Oemar,1994:159). Perluasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekspor gula, lahan-lahan persawahan dijadikan kebun tebu, hal ini makin menyulitkan kehidupan rakyat Indonesia. Banyak petani

yang pergi ke kota menjadi buruh atau kuli di perkebunan-perkebunan dengan gaji 20-40 sen perhari (Yuliati,2000:43)

Kaum tani dipaksa untuk tidak menanam padi dan menggantinya dengan tebu, hal ini terjadi karena para lurah disuap dengan f 2.50 untuk setiap bau sawah yang dapat di sewa untuk perkebunan tebu. Lurah-lurah sudah sepenuhnya menjadi alat kepentingan para pengusaha perkebunan, tidak ada pihak yang berani membela kepentingan petani. Untuk melepaskan diri dari keadaan itu, para petani menempuh dua jalan yaitu pertama lari ke kota dan kedua membakar kebun tebu sebagai pernyataan protes. Di sisi lain para ibu menjual anak-anaknya di pasar, dan sebagian besar penduduk mengganti makanan pokoknya dari beras menjadi jagung dan akar pohon pisang (Gie,2005:13-14).

Perang dunia I berdampak buruk bagi perekonomian Hindia Belanda. Transportasi kapal mengalami kemunduran akibat permintaan pemerintah Inggris yang memerlukan sejumlah besar kapal Belanda. Dalam bulan Oktober 1917, Inggris melarang ekspor beras dari India ke Hindia Belanda. Sejumlah makanan menjadi sangat mahal dan harga-harga naik lima kali diatas normal. Periode 1918-1919 Hindia Belanda terjadi inflasi harga barang kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan gaji pegawai tidak naik, sehingga terjadi kemerosotan standar kehidupan para pekerja (Yuliati,2000:36).

Kenyataan sosial yang terjadi mendorong munculnya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik saat itu, dengan tujuan mengadakan perubahan dalam bidang ekonomi khususnya dan segala bidang kehidupan bangsa pada umumnya. Salah satunya gerakan yang dilakukan oleh

Semaun, mengambil alih kepemimpinan SI Semarang dalam tahun 1917 dan berhasil memimpin pemogokan-pemogokan. Lahirnya pergerakan politik tersebut ternyata juga belum dapat mengubah kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, namun kadangkala menjadi sebaliknya. Seperti setelah terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1926 justru terjadi kenaikan harga-harga yang mencapai seratus persen dari harga semula. Kota Semarang semakin lama semakin berkembang fungsinya, tak hanya sebagai kota perdagangan namun juga kota militer, pemerintahan, pendidikan, bahkan pariwisata. Kota Semarang di sisi lain tumbuh menjadi pusat pergerakan politik.

Kehidupan politik di Semarang pada awal tahun 1900-an dapat di katakan hampir tidak ada, karena pembicaraan mengenai politik merupakan hal terlarang. Pertemuan-pertemuan politik mulai diadakan setelah Semarang menjadi *gemmeente*, namun orang hanya boleh mengadakan pertemuan politik untuk memuji anggota gementeraad (Dewan Perwakilan Daerah). Pembicaraan politik biasanya dilakukan menggunakan bahasa Belanda kemudian oleh asisten residen pembicaraan disalin kedalam bahasa melayu dengan ringkas, agar orang pribumi dan orang Tionghoa bisa mengerti (Joe,2004:219).

Organisasi-organisasi politik mulai muncul di kota Semarang pada akhir tahun 1912 diantaranya yaitu *Indische Partij* (1912), *Sarekat Islam* (1912), *Indische Social Democratische Van Spoorer Tramweg Personeel* (1908), *Partai Komunis Indonesia* (1920), *Partai Nasional Indonesia* (1927), *Partai Bangsa Indonesia* (1927). Beberapa organisasi tersebut menggunakan surat kabar, jurnal, atau majalah sebagai sarana dalam menyuarakan kepentingannya.

C. Sejarah Munculnya Pers di Indonesia

Percetakan di Indonesia bermula pada kedatangan Belanda di kepulauan Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangannya berjalan sejajar dengan ekspansi bertahap kolonialisme Belanda. *Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie* (VOC), mulai menyadari manfaat percetakan untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintah. Pengenalan percetakan ini juga diprakarsai oleh para misionaris Gereja Protestan Belanda yang menggunakannya untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah untuk keperluan penginjilan (Adam,2004:1).

Para misionaris Gereja yang mula-mula berusaha memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda pada 1624, namun karena tak ada tenaga terampil yang menjalankannya, mesin cetak akhirnya tidak digunakan sama sekali. Pengurus Gereja mengusulkan kepada pemerintah pusat Batavia mencari dan menugaskan seorang tenaga operator terampil dari Belanda, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pencetak dalam menerbitkan kitab keagamaan dan traktat-traktat.

Upaya memperkenalkan percetakan tersebut tidak terwujud hingga 1659, sampai seorang bernama Kornelis Pijl memprakarsai percetakan dengan memproduksi sebuah *Tijtboek*, yakni sejenis almanak, atau “buku waktu” (Encyclopedia Indonesia,1990:88). Setelah itu tidak ada kegiatan percetakan hingga 1667, yaitu ketika pemerintah pusat berinisiatif mendirikan sebuah percetakan dan memesan alat cetak yang lebih baik. Produk pertama percetakan ini adalah Perjanjian Bongaya, dokumen ini dicetak oleh Hendrick Brant yang

pada Agustus 1668 mendapat kontrak mencetak dan menjilid buku atas nama VOC (Adam,2004:2).

VOC menandatangani kontrak baru dengan Pieter Overtwater dan tiga pegawai Kompeni lainnya Setelah kontrak dengan Brant berakhir pada 16 Februari 1671. Percetakan ini dinamakan *Boeckdrucker der Edele Compagnie*. Dalam perkembangan selanjutnya Andreas Lambertus Loderus, seorang mantan pendeta mengambil alih percetakan pada tahun 1699 untuk didayagunakan secara maksimal. Banyak karya penting dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Latin-Belanda-Melayu yang disusun oleh Loderus sendiri.

Keberadaan percetakan pada tahun-tahun pertama abad ke-18 berperan penting di Hindia Belanda, yang digunakan untuk menghemat tenaga penulis pengganda. Dalam periode ini percetakan hanya mencetak dokumen dan buku-buku kompeni untuk para pegawainya dan tidak terlihat upaya menerbitkan surat kabar sampai sekitar 120 tahun setelah sebuah percetakan berdiri di Batavia (Adam,2004:3).

Surat kabar tercetak pertama lahir dari percetakan Benteng yang diberi nama *Bataviasche Nouvelles*, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhov, yang berhaluan liberal dan ingin meningkatkan kehidupan intelektual dan kebudayaan di Batavia. Surat kabar ini terbit dikelola oleh Jan Erdman Jordens, terbit mingguan dan telah mendapat izin awal selama tiga tahun dan mulai terbit tanggal 7 Agustus 1744. Para direktur pelaksana VOC di Amsterdam yang berjumlah 17 orang (De Heeren Zeventien) tidak senang melihat surat kabar ini, karena dianggap akan merugikan dan membahayakan

kepentingan VOC. Sebelum izin tersebut berakhir, surat kabar ini harus berhenti terbit pada tanggal 20 Juni 1746 (Ensiklopedia,1990:88).

Usaha percetakan yang dikendalikan Dominicius berkembang menjadi usaha penerbitan dan menerbitkan surat kabar *Vendu Nieuws*, menjelang pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Surat kabar ini merupakan media iklan mingguan, terutama mengenai berita lelang koran ini dikenai sensor ketat dan harus menghentikan penerbitannya pada tahun 1809 masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Deandels (1808-1811). Deandels membeli percetakan kota dan menggabungkannya dengan percetakan Benteng menjadi *Landsdrukkerij* (percetakan negara) yang masih terus bekerja sampai pemerintahan kolonial berakhir. Percetakan ini menerbitkan media resmi pemerintah untuk mempublikasikan reformasi pemerintahan Deandels di Jawa. Edisi pertama mingguan *Bataviasche Koloniale Courant* terbit pada 15 Januari 1810 di Batavia.

Surat kabar yang ada pada abad ke-18 merupakan surat kabar resmi milik pemerintah. Satu-satunya percetakan Non-pemerintah adalah percetakan Misionaris yang digunakan untuk mempublikasikan keputakaan dan penerjemahan injil serta katekisma-katekisma keagamaan, percetakan ini setelah pertengahan abad ke-19 memasuki dunia surat kabar (Adam,2004:8-11).

Percetakan milik swasta muncul pada abad ke-19, *Landsdrukkerij* menerbitkan *Bataviasch Advertentieblad* di Batavia pada tahun 1825. Surat kabar mingguan pertama terbit di Surabaya bernama *Soerabayasche Courant* pada tahun 1837 yang diterbitkan oleh C.F.Smith. setelah itu di Semarang juga terbit surat

kabar mingguan sebagai media pengiklan dengan nama *Semarangsch Advertentieblad* pada tahun 1845 dicetak di percetakan *Oliphant & Co.*

Masuknya percetakan ke Indonesia juga merangsang tumbuhnya surat kabar berbahasa Belanda dikota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, yang mengakibatkan di umumkannya undang-undang pers pada tahun 1856. Undang-undang pers ini yang kemudian mendorong tumbuhnya pers berbahasa anak negeri di Indonesia, sebagai pelopor surat kabar nasional pertama yaitu "*Medan Priyayi*" dibawah pimpinan R.M. Tirta Adisuryo.

Perusahaan percetakan pada masa kolonial biasanya juga berperan sebagai penerbit baik buku atau surat kabar. Sampai tahun 1920 kurang lebih 11 percetakan ada di kota Semarang, yaitu NV $\frac{v}{h}$ G.C.T. Van Dorp & Co, NV Handel Maatschappij dan Drukkerij Sarekat Dagang Islam Semarang Merk Sinar Djawa, Firma Benjamin & Co, Firma Bisschop & Co, Firma Masman & Stroink, NV Dagblad "De Locomotif", De Firma Misset & Co, Semarang Drukkerij NV Semarangsch Courant, NV Java Ien Boe Kongsie dan Nieuwe Courant (Adam,2004:307-316,&Joe,2005:251-252).

B. Perkembangan Pers di Semarang

Liberalisme yang muncul di Belanda mengakibatkan dilaksanakannya konstitusi baru yang lebih demokratis dalam tahun 1848 membawa dampak bagi perkembangan pers di Hindia Belanda. Sistem liberal membuka peluang bagi para pengusaha swasta di Hindia Belanda bergerak dalam bidang bisnis persuratkabaran (Yuliati,2000:59).

Semarang merupakan salah satu kota yang menjadi pusat industri surat kabar sejak pertengahan abad ke-19. Hal ini dikarenakan kota ini merupakan kota pelabuhan dan sekaligus merupakan pusat-pusat kegiatan perdagangan. Kepentingan kota Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dapat dilihat dari sejarah pembangunan jalan-jalan kereta api yang tujuannya untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari daerah pedalaman ke pelabuhan Semarang. Meningkatnya hasil bea cukai setiap tahun, menunjukkan ramainya pelabuhan Semarang.

Tabel 4 Hasil Bea Cukai di Semarang tahun 1916-1925 (dalam ribuan)

Tahun	Hasil
1916	f 5.250
1917	f 5.031
1918	f 4.882
1919	f 6.336
1920	f 12.516
1921	f 12.264
1922	f 11.933
1923	f 10.180
1924	f 10.640
1925	f 12.360

Sumber: Brommer,1995:28

Penerbit surat kabar mulai muncul di Semarang, sejak pertengahan abad ke-19 diantaranya yaitu, *Oliphant & Co* dalam tahun 1846 telah mendapat ijin dari Gubernur Jenderal J.J.Rochussen untuk menerbitkan *Semarangsche Advertentieblad*, Firma ini juga menerbitkan *Semarangsche Courant*. P.J. de Groot mencetak dan menerbitkan *Semarangsche Nieuws en Advertentieblad* pada tahun 1852 dan berganti nama menjadi *De Locomotif* pada tahun 1863. Nama ini dihubungkan dengan pendirian *Nederlandsch-Indische Spoorweg Nij* (Yuliati,2000:62).

De Locomotif awalnya hanya terbit dua kali dalam seminggu, dalam waktu singkat menjadi terbit harian. Surat kabar ini tidak mendapat saingan dari surat kabar lain di Semarang pada tahun 1866, sehingga semakin berkembang. *De Locomotif* merupakan surat kabar yang berpengaruh bagi pembaharuan politik kolonial.

Pers terbit sebagai bagian usaha orang Belanda pada awal perkembangannya, tetapi kemudian berkembang menjadi pembawa kepentingan perusahaan perkebunan dan industri minyak. Isinya belum mencerminkan persoalan-persoalan politik masa itu, karena pemerintah Hindia Belanda mengatur berita yang tidak berbahaya bagi pemerintah sendiri. Pers orang Belanda sejak semula merupakan “pers resmi”, karena isinya harus disetujui pemerintah, baru ada penerbitan pers yang digolongkan dalam kelompok pers tidak resmi (Surjomiharjo,2002:30).

Surat kabar berbahasa Tionghoa dan Melayu-Tionghoa mulai terbit dalam perkembangan selanjutnya. Surat kabar *Selompret Melajoe* terbit di Semarang pada tanggal 3 Februari 1860, penerbitnya adalah *G.C.T Van Dorp*. Pembaca surat kabar ini kebanyakan dari kalangan Melajoe dan Tionghoa, dan merupakan surat kabar melayu pertama di Semarang. Surat kabar ini berisi tentang maklumat pemerintah, berita luar negeri, berita kota, dan advertensi (iklan). Surat kabar ini mempunyai satu halaman penuh berbahasa Jawa untuk menjamin peredarannya tidak hanya terbatas dikalangan pembaca berbahasa melayu.

Surat kabar ini pada tahun-tahun pertama dimuat, sangat berhati-hati dalam membuat berita atau artikel, karena takut melanggar peraturan media cetak.

G.C.T Van Dorp sendiri yang memikul tanggung jawab isi dan nama redaktornya tidak dicantumkan. Harga langganannya relatif murah karena banyak advertensi yang dimuat, surat kabar ini bertahan hingga bulan oktober 1911.

Firma Gebruders Janz Bros menerbitkan surat kabar melayu dengan nama *Tamboor Melayu*, dibawah pimpinan Tuan Sie Hian Ling. Surat kabar ini terbit pada tanggal 30 januari 1888, setiap hari selasa, kamis dan sabtu. Namun kemudian Abraham Janz meninggal dunia, sehingga istrinya tak dapat meneruskan usaha *Tamboor Melayu*, dalam tahun ke empat surat kabar ini berhenti terbit (Joe,2004:181-182).

Hoang Thaij & Co dalam tahun 1899 menerbitkan *Sinar Djawa*, dibawah pimpinan Sie Hian Ling yang berkantor di Karang Sari. Surat kabar ini diambil alih oleh *Sarekat Islam* pada tahun 1913 dan berganti nama menjadi *Sinar Hindia* pada tahun 1918. Surat kabar ini merupakan surat kabar pribumi pertama di Semarang , dan dapat bertahan hingga tahun 1924.

J.A. Retel Helmrich, Direktur administrasi dari *Semarangsche Courant* menerbitkan edisi melayu yang diberi nama *Pemberita Semarang* kemudian dalam tahun 1900 berganti nama menjadi *Bintang Semarang*. Surat kabar ini bertahan hingga tahun 1906.

N.V. Java Ien Boe sebuah kongsi yang didirikan atas usaha Tuan Be Kwat Yoe dengan tujuan untuk menjual barang-barang buatan Tiongkok di Semarang. Pada akhir bulan Desember 1909 membuat buku-buku Tionghoa, baik untuk *Tiong Hoa Hwee Koan* maupun untuk bacaan, kongsi ini juga menerbitkan lembar

percobaan dari dua surat kabar harian berbahasa Tionghoa yang diberi nama *Jawa Kong Po* dan berbahasa Melayu-Tionghoa yang diberi nama *Jawa Tengah*.

Jawa Kong Po dibawah pimpinan Be Nay Tong dan Souw Kam Ting, setahun kemudian berhenti terbit karena mengalami kerugian lebih dari f.10.000. kerugian ini disebabkan oleh sedikitnya orang Tionghoa yang suka membaca, surat kabar ini merupakan surat kabar harian Tionghoa yang pertama (Joe,2004:230-231).

Warna Warta terbit di Semarang pada tahun 1902, surat kabar ini awalnya milik *N.V. Drukkerij en Handel in Schijf Behoften* “Hap Sing” Kongsie dan merupakan organ tidak resmi *Tiong Hoa Hwee Koan*, pemimpin redaksi *Warna Warta* bernama F.D.J. Pangemanan (Adam,2004:131). Karena seringnya melawan pemerintah, beberapa kali redaktornya diadili (Surjomiharjo,2002:77). Surat kabar ini kemudian berganti pemilik dan namanya diganti menjadi *Sin Djiet Po*, koran ini terbit hingga tahun 1933.

Surat kabar *Djawa Tengah* terbit di Semarang pada bulan Desember 1909, dicetak di *N.V. Java Ien Boe Kongsie* dan setelah tahun 1930 NV tersebut diganti menjadi NV baru yaitu *Handel Maatschappijeen Drukkerij Djawa Tengah*. *Djawa Tengah* berpendirian konservatif dan mencoba mengambil jalan tengah dalam perselisihan antara *Chung Hua Hui* dengan peranakan Tionghoa. Bulanan *Djawa Tengah* yaitu *Djawa Tengah Review*, sering memperbincangkan persoalan Tionghoa di Indonesia yang menimbulkan polemik. Surat kabar ini bertahan hingga tahun 1938 (Surjomiharjo,2002:54).

Surat kabar Melayu-Tionghoa pada permulaan bulan Mei 1920 mulai membicarakan mengenai perempuan yang memotong rambutnya, yang pada saat itu kebiasaan tersebut masih sangat ditentang keras oleh orang Tionghoa. Hampir semua penulis menyatakan beberapa tahun kemudian anggapan itu telah berubah karena sejak tahun 1928 sebagian besar dari kaum isteri Tionghoa yang masih muda, telah memotong rambut mereka (Joe,2005: 285).

Pers Bureaux (kantor berita) Melayu telah banyak berdiri pada tahun 1924, hampir disetiap kota-kota besar banyak didirikan kantor berita. Kurang lebih 4 *Pers Bureux* berdiri di Semarang diantaranya yaitu *Pait, Nicork, Alpena, Andika, Tionghoa, Patkwah, Awas, Cepeka, Samsol, de Kracht, Platina, Azia*, dan semua *Pers Bureux* tersebut saat ini sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1926 kata Indonesia mulai dipakai dalam setiap surat kabar di Jawa untuk mengganti sebutan Indonesier, dua tahun kemudian bahasa Melayu diumumkan oleh orang Indonesier sebagai bahasa Indonesia yang dikumandangkan dalam sumpah pemuda (Joe,2004:99&306). Joe seorang wartawan dari Semarang sekitar tahun 1930-an, ia melakukan penelusuran pada arsip-arsip kongkoan Semarang. Dalam menggali sejarah Semarang, ia melengkapi datanya dengan menggali dari surat kabar *De Locomotif*.

Semarang merupakan tempat berpijak bagi jurnalis Belanda yang berhaluan etis dan liberal pada pertengahan abad ke-19. Semarang menyaksikan bentuk lain dari perkembangan dan kehidupan pers. Dalam abad ke-19 belum muncul pengelola pers dari kalangan bumi putera, setelah abad ke-20 kalangan bumi putera di Semarang tampil dalam dunia persuratkabaran (Yuliati,2000:65).

Daja Oepaja merupakan surat kabar yang dianggap penting di Semarang, surat kabar ini dibawah pimpinan Syamsoedin Soetan Makmoer, *Daja Oepaja* terbit dua kali seminggu, kemudian menjadi surat kabar harian. Surat kabar ini mengakhiri penerbitannya pada tahun 1938 karena kekurangan iklan dan langganan. Koran pribumi lainnya adalah surat kabar *Bahagia* pimpinan M.Yoenoes.

Demikianlah berbagai surat kabar yang terbit dan berkembang di kota Semarang. Surat kabar tersebut, beberapa diantaranya menjadi media pergerakan organisasi-organisasi pribumi. Surat kabar yang terbit di Semarang dalam periode 1900-1930, kurang lebih tercatat 15 surat kabar.

BAB III
KEBIJAKAN PERS PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
DI SEMARANG (1912-1930)

A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Mengenai Pers

Semarang adalah kota pelabuhan dan pusat kegiatan perdagangan seperti Batavia dan Surabaya. Semarang menjadi pusat industri surat kabar yang penting, dan bersaing ketat dengan kota-kota besar lainnya dalam menerbitkan surat kabar terkemuka berbahasa Belanda dan Melayu pada pertengahan abad ke-19. bisnis surat kabar menarik minat para penerbit dan pemilik usaha percetakan disebabkan banyaknya jumlah penduduk di Semarang, yang bersifat urban dan komersial. Kota Semarang sebagai kota pelabuhan pusat lalu lintas pengapalan hasil pertanian, cenderung menarik saudagar dan pedagang dari berbagai bangsa. Para pedagang ini sangat membutuhkan media pengiklan untuk memasarkan komoditas yang diperjual-belikan, mengetahui harga terakhir di pasar, mengetahui informasi mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal serta benda pos (Adam,2003:12).

Surat kabar milik swasta mulai terbit di Semarang pada abad ke-19. Pada mulanya surat kabar merupakan usaha orang Belanda dan Tionghoa yang membawa kepentingan usaha perkebunan Belanda maupun perdagangan orang-orang Tionghoa. Isinya masih seputar masalah ekonomi, kebudayaan, iklan, dan sedikit berita luar negeri. Munculnya surat kabar milik swasta membuat pemerintah menciptakan alat untuk mengekang pertumbuhan pers di Semarang, yaitu dengan membuat undang-undang pers pada tahun 1856.

Media pergerakan muncul di Semarang, sejalan dengan derap pergerakan kebangsaan di Indonesia. *Sarekat Islam* Semarang memiliki *Sinar Djawa* dan dalam tahun 1918 berganti *Sinar Hindia*. Organ *Insulind* yaitu *Goentoer Bergerak* terbit pada tahun 1915, *Perhimpunan Pegawai Negeri Sekolah Rendah* mempunyai surat kabar *Soera Setalian* yang terbit pada tahun 1919. *SI Tetap* menjadi organ VSTP yang terbit pada tahun 1919 hingga tahun 1925, dan *Persatuan Hindia* merupakan surat kabar milik *Nasional Indische Partij*. Demikian juga PKI menerbitkan surat kabar *Api* pada tahun 1924 dan mampu bertahan hingga tahun 1926 (Yuliati,2000:62-63).

Media organisasi yang lahir dan bangkitnya kesadaran politik, sosial dan ekonomi dikalangan pribumi mengancam aturan kolonial yang sangat mendasar. Munculnya partai politik telah menyiagakan pemerintah akan bahaya kebebasan pers, yang dimungkinkan oleh pelanggaran undang-undang pers Hindia tahun 1906. Pemerintah melakukan amandemen lagi terhadap undang-undang pers pada tahun 1914. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang 1914 pemerintah melanjutkan tekanan terhadap perbedaan pendapat politik dalam pers berbahsa anak negeri, yang semakin radikal sejak 1913 (Adam,2003:293).

B. Pengawasan Bersifat Preventif dan Represif

Tekanan terhadap surat kabar yang terbit di Hindia Belanda telah nampak pada *Bataviasche Nouvelles*, sebelum ditetapkannya peraturan mengenai pers. Surat kabar ini terpaksa berhenti terbit karena Direktur pelaksana VOC di

Amsterdam tidak senang dengan kehadiran surat kabar ini. Surat kabar ini dianggap dapat merugikan dan membahayakan kepentingan VOC (Smith,1949:3).

Pemerintah Belanda mulai menerbitkan kembali surat kabar yang diberi nama *Vendu Nieuws*, setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799. Pada tanggal 2 November 1809 dibuat peraturan yang menjadikan surat kabar ini sebagai Neo-penerbitan dan catatan kegiatan untuk pemerintah. Peraturan itu termasuk pula ketentuan mengenai penyensoran yang tertulis sebagai berikut:

Pasal 9. Surat kabar tersebut akan terbit pada setiap Jumat dan akan selalu di sampaikan sehari sebelumnya untuk di setujui, kepada mereka yang diangkat oleh Yang Mulia Marsekal dan Gubernur Jenderal untuk itu.....

Pasal 13. Penyensoran iklan dan bahan lainnya yang dikirim ke percetakan oleh perorangan akan dilaksanakan sekretaris pemerintah, dan untuk maksud itu naskah yang dikirimkan oleh perorangan tersebut akan disampaikan kepadanya oleh mandor percetakan, untuk disahkan agar dicetak atau kalau ia menemukan hala yang menjadi keberatan didalamnya ia akan membuat laporan kepada Yang Mulia Marsekal dan Gubernur Jenderal (Smith, 1949:64).

Edward C.Smith seorang penulis buku yang meneliti mengenai sejarah pembreidelan pers di Indonesia, menurutnya pengawasan terhadap pers telah terjadi sejak diterbitkannya koran pertama di Hindia. Smith adalah seorang dari luar kalangan pers sehingga tulisannya bebas dari subyektifitas dan keberpihakan.

Peraturan pertama mengenai pers yang ditetapkan dalam *Reglement op de Drukwerken In Nederlandsch-Indie* (RR) pada tahun 1856. peraturan ini diperbaiki kembali pada tahun 1906 sesuai tuntutan keadaan dan sulitnya menetapkan sistem sensor *preventif*.

Drukpers Reglemen tahun 1856 merupakan alat untuk mengekang pertumbuhan pers dan sebagai cara untuk menindak setiap kritik yang tidak diterima oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini dibuat sebagai reaksi terhadap munculnya pers swasta di daerah koloni yang sebagian besar berkarakter liberal dan dianggap mengganggu pemerintah karena sifatnya terus terang dan menghasut (Yuliati,2000:194).

Peraturan RR 1856 yang mencerminkan sifat pengawasan *preventif* berikut ini dikutip dari karya Surjomiharjo sejarawan yang menekuni sejarah pers di Indonesia, ia telah melakukan penelitian sejak tahun 1976-1980.

Pasal 13. Semua karya cetak sebelum diterbitkan satu eksemplar harus dikirimkan dulu kepada kepala pemerintahan setempat pejabat justisi dan Algemene Secretarie. Pengiriman ini harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbitnya dengan ditanda tangani. Kalau ketentuan ini dilanggar maka akan mengakibatkan penyegelan percetakan atau tempat penyimpanan barang-barang percetakan, atau dikenakan denda f.50 – f.1000 (Surjomiharjo,2002:171-172).

Pihak-pihak demokratis mendesak *Drukpers Reglement* tahun 1856 agar diperbaiki dan pada tahun 1906, peraturan tersebut diperbaharui dengan *Koninklijk Besluit* 19 Maret 1906, sistem pengawasan *preventif* (mencegah) diganti dengan sistem pengawasan *repressif* (mengekan atau menekan). Dalam *Reglement* tahun 1856, 1 eksemplar karya cetak dikirimkan ke pejabat yang bersangkutan sebelum diedarkan, sedangkan dalam *Koninklijk Besluit* 1906 karya cetak baru dikirim 24 jam setelah diedarkan, denda yang dikenakan berkurang menjadi f.10 – f.100.

Peraturan-peraturan pers berdasarkan ketentuan sensor ini lahir didahului tindakan-tindakan dijatuhkannya hukuman badan dan pembuangan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap para wartawan yang sejak awal menginginkan kebebasan pers. Dalam abad ke-19 tercatat kurang lebih 19 orang wartawan dibuang karena memperjuangkan kebebasan pers di daerah jajahan (Harahap,2000:114).

Pemerintah Belanda dalam menerapkan undang-undang pers tidak berat sebelah, peraturan mengenai pers berlaku tidak hanya bagi penerbitan-penerbitan pribumi namun juga berlaku untuk penerbitan Belanda yang dianggap telah melanggar undang-undang pers. Sebagai contoh yaitu J.W Cohen Stuart dari surat kabar *De Locomotief* ditahan pada tahun 1879. Cohen dituduh menulis artikel yang menghasut dan sangat kritis terhadap gubernur jenderal dalam korannya edisi 8 Januari 1879, Cohen dihukum 6 bulan penjara. Pemerintah juga tidak segan-segan melakukan pembreidelan terhadap penerbitan yang dianggap melanggar undang-undang pers. *Selompret Melajoe* pada bulan Oktober 1885 di breidel oleh pemerintah Belanda dengan alasan koran tersebut telah melanggar undang-undang pers 1856, akibatnya *Selompret Melajoe* tidak terbit lagi di Semarang sejak 8 Oktober 1885. Residen Semarang J.M Van Vleuten memohonkan ijin meneruskan penerbitan *Selompret Melajoe* kepada gubernur, sehingga surat kabar ini dapat terbit kembali pada 17 Oktober 1885 (Adam,2003:93-95).

B. Peraturan yang Bersifat Karet dan Pers Breidel Ordonantie

Menteri Daerah Jajahan De Waal Malefijt pada tanggal 2 Juni 1913 menulis kepada Gubernur Jenderal Idenburg, ia menyarankan untuk mencari bentuk represi baru dari *durkpersreglement* tahun 1906. Malefijt juga menekankan pemberlakuan pengawasan preventif tidak hanya dengan mengubah peraturan tersebut, namun dengan mencari bentuk represi baru. Berikut ini kutipan surat Malefijt kepada Idenburg:

Tindakan yang keras harus dilakukan terhadap khotbah umum yang menentang kekuasaan, Belanda terhadap usaha-usaha yang menjengkelkan untuk mendiskreditkan maksud-maksud baik pemerintah, terhadap tindakan menanam rasa kebencian dan permusuhan di antara kelompok penduduk yang sekarang ini sudah menggejala. Membiarkan tekanan dari fakta-fakta itu dalam perdebatan di antara penguasa-penguasa hukum di Hindia, adalah pembunuhan politik. Selanjutnya saya berpendapat bahwa peraturan seperti itu harus diberlakukan tanpa perbedaan walaupun pers non-Eropa yang paling berbahaya bagi keamanan dan ketentraman memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pada pers Eroopa yang jangkauannya tidak luas dan memerlukan bantuan pers Bumiputera dan Cina untuk sampai pada berbagai lapisan penduduk. Pemberlakuan pengawasan preventif, tentu saja, tidak mungkin dengan mengubah *drukpersreglement* 1906. oleh karena itu harus dicari bentuk represi baru, tidak oleh penguasa hukum, tetapi oleh pemerintah (Yuliati,2000:196-97).

Wetboek van strafrecht (KUHP) setahun kemudian dilengkapi dengan peraturan yang dikenal dengan nama *Haatzaai Artikelen* (pasal-pasal tentang menanam benih kebencian) pada tanggal 15 Maret 1914 yang isinya sebagai berikut:

Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan kebencian atau penghinaan kepada pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, akan dihukum penjara selama 5-10 tahun.

Barang siapa baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian, penghinaan diantara penduduk Belanda atau Hindia Belanda akan dihukum penjara selama 6 hari sampai 5 tahun. Usaha untuk melakukan kejahatan ini dapat dihukum (Yuliati,2000:198).

Pasal-pasal tersebut dicabut pada tahun 1918 dan diganti dengan pasal 154 dan pasal 156 yang lebih berat lagi.

Pasal 154. Barang siapa mengeluarkan pernyataan di Nederland atau Hindia Belanda, dihukum penjara atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah Belanda.

Pasal 156. Barang siapa mengeluarkan pernyataan ditempat umum yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan kebencian kepada beberapa golongan penduduk Hindia Belanda, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah Belanda (Gie,2005:29).

Jurnalist di pulau Jawa yang tertangkap pada periode 1919-1920 kurang lebih terdapat 15 orang, dua diantaranya adalah Sarimin Partoatmodjo (1919) dan Danoedioe (1920) dari Semarang. Tuduhan yang ditujukan adalah pasal yang mengancam hukuman terhadap “penyebarkan kebencian kepada pemerintah Hindia Belanda”.

Masyarakat Hindia Belanda mengenal pasal-pasal tersebut dengan sebutan *Haatzai Artikelen*, karena pasal-pasalnya ditujukan terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belanda (Pasal 154 dan Pasal 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok di Hindia Belanda (Pasal 156 dan Pasal 157). Kelompok penduduk yang dimaksud adalah perbedaan penduduk berdasar ras agama, kebangsaan, keturunan, suku (Surjomiharjo,2002:173).

Haatzai Artikelen dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, pertama dimasukkan dalam kejahatan “Melanggar Ketertiban Umum” (Pasal-pasal 156 dan 157 *Wetboek Van Strafrecht*), kelompok kedua dimasukkan dalam “Kejahatan Melanggar Kekuasaan Umum” (Pasal-pasal 207 dan 208 *Wetboek Van Strafrecht*). Ancaman hukuman ditujukan kepada siapa yang dengan sengaja melakukan penghinaan lewat tulisan, lisan, dan gambar.

Perincian hukuman untuk pelanggaran pasal 154 paling tinggi 7 tahun atau denda paling banyak 300 gulden, pasal 155 hukuman paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 300 gulden. Untuk pelanggaran pasal 156, hukuman yang diberikan paling lama 4 tahun atau denda 300 gulden, pasal 157 hukumannya paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda 300 gulden. Ancaman hukuman yang termasuk dalam kelompok dua lebih ringan, pasal 207 diancam hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan atau paling banyak 300 gulden, pasal 208 diancam hukuman paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 300 gulden. Pada setiap pasal jumlah denda berupa uang, nominalnya tidak berbeda (Surjomiharjo,2002:174)

Peraturan yang diciptakan untuk mengekang kebebasan pers tidak cukup untuk mengatasi keberanian pers bumi putera dalam mengemukakan ulasan, pendapat kritik terhadap praktik-praktik kolonial sehingga dibentuk peraturan baru. Pada tanggal 7 September 1931 Gubernur Jenderal De Graeff mengumumkan berlakunya peraturan tentang pers yang dikenal dengan *Pers*

Breidel Ordonantie, dalam peraturan ini pemerintah diberi kekuasaan untuk mengambil tindakan yang dikehendaki.

Pers Breidel Ordonantie memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk melarang terbit, penerbitan tertentu yang dinilainya dapat mengganggu ketertiban umum. Berikut ini kutipan pasal-pasal yang ada dalam *Pers Breidel Ordonantie*:

Pasal 1. Gubernur Jenderal berhak menunjuk penerbitan tertentu yang bisa dilarang terbit untuk sementara, karena tulisan-tulisannya dinilai bisa “mengganggu ketertiban umum”, jika tulisan-tulisan itu dianggap melunak penunjukan tersebut bisa di cabut. Jika pencabutan penunjukan tidak dilakukan maka penunjukan ini berlaku untuk satu tahun.

Pasal 2. Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, penerbitan dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Surat kabar yang bersangkutan, sesudah terbit dinilai mengganggu lagi “ketertiban umum” larangan terbit menjadi lebih lama, namun tidak lebih dari 30 hari berturut-turut. Bagi penerbitan berkala larangan itu tidak lebih lama dari tiga kali jangka waktu terbit, antara penerbitan satu dengan lainnya (Surjomiharjo,2002:172-173).

Penetapan pers breidel ordonantie ini bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda, yang membuat pemerintah bertindak keras menjaga ketertiban, serta diberlakukannya pasal-pasal karet (yang bisa molor sesuai pemegangnya). Berlakunya peraturan tersebut membuat pergerakan politik yang ada mulai melemah (Moedjanto,1991:57-58). Partai-partai politik dihancurkan dan kebebasan berbicara serta berkumpul dilarang, membuat aktivitas politik terbuka memiliki ruang umum yang sempit untuk bergerak. Para pemimpin politik di akhir tahun 1930-an benar-benar dilarang dalam kegiatan

politik terbuka (Ingleson,2004:244). Dalam arsip Bineenland Bestuur, surat ijin yang dikeluarkan oleh Direktur Binenland Bestuur (pemerintah daerah) pada tanggal 18 Mei 1916, tercatat surat kabar milik orang Tionghoa yang mendapat ijin terbit pada zaman malaise di Semarang terdapat tiga surat kabar yaitu *Djawa Tengah*, *Warna Warta*, dan *Sinar Djawa*.

BAB IV

**PERKEMBANGAN PERS DALAM KAITANNYA DENGAN
PERKEMBANGAN POLITIK DI SEMARANG (1912-1930)**

A. Kegiatan Politik di Semarang

Alexander W.F. Idenburg pada tahun 1902 menjadi menteri urusan daerah jajahan, berusaha mempraktikkan pemikiran politik etis yang berdasar pada tiga prinsip yaitu pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk. Pendidikan merupakan salah satu kebijakan politik etis, tidak hanya menghasilkan beberapa pegawai yang pandai dan setia, namun juga menghasilkan beberapa kaum elite yang tidak puas dan memimpin gerakan-gerakan anti penjajahan.

Kesadaran politik Indonesia mulai bangkit dalam kelahiran beberapa perkumpulan politik semu seperti tercermin dalam *Sarekat Islam* (SI) dan *Indische Partij* (IP), organisasi tersebut memperjuangkan perbaikan kesejahteraan orang Indonesia dan perkembangan yang bersifat ideologis ditengah dialektis antara kebangkitan kesadaran politik Indonesia dan pertumbuhan pers berbahasa anak negeri (Adam,2003:267).

Politik mulai memasuki dalam setiap pembicaraan di *gemmeenteraad* ketika orang Olanda Indo mulai menjadi anggota *gemmeenteraad* dan adanya perhatian terhadap pergerakan Douwes Dekker. Pergerakan tersebut memicu timbulnya pergerakan politik dikalangan penduduk pribumi yang membuat diajukannya wakil dalam *gemmenteraad*.

Perubahan pada Desember 1916 mengenai pembentukan *Volksraad*, susunan dan tugasnya tertulis dalam *Staad Blad* tahun 1917 no.114, diadakannya peraturan ini secara tidak langsung meruntuhkan peraturan dalam pasal 111 *Reglement op de Drukwerken In Nederlandsch-Indie* (RR) tentang larangan bagi adanya organisasi politik di Hindia Belanda. Pencabutan RR pasal 111 baru terlaksana pada 17 Desember 1918 dengan keluarnya *Koninklijk Besluit* yang mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1919 dan tercantum dalam *Staad Blad* 1919 no.27. Pasal 111 RR belum sepenuhnya dicabut karena pasal 3 peraturan yang baru masih mencantumkan pasal karet terhadap pendirian organisasi yang tujuan dan aktivitasnya dirahasiakan maupun yang dinyatakan bertentangan dengan keamanan umum oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun oleh pemerintah kerajaan Belanda (Hardjosatoto,1985:111-12;Sulistyo,1995:81).

Douwes Dekker seorang Indo memberi inspirasi bagi mahasiswa STOVIA untuk mendirikan Boedi Oetomo. Pengalaman dibidang jurnalistik, yang berawal sebagai koresponden *De Locomotif*, *Bataviasch Newsblad*, dan *Soerabaiasch Handelsblad* menjadikannya sangat mengenal kehidupan dan kondisi di Hindia. Douwes Dekker menyadari bahwa orang Indonesia tidak sepenuhnya percaya dengan orang Indo, orang Indo hidup dibawah tingkatan ekonomi yang lebih rendah dari masyarakat kolonial, hanya terdapat sedikit perbedaan antara penduduk pribumi dengan orang setengah Indonesia. Oleh karenanya Dekker mempunyai keinginan yang kuat untuk menyatukan orang Indo dan pribumi dalam upaya merumuskan tujuan politik bersama dan berjuang bagi kesetaraan hukum (Adam,2004:275).

Organisasi pribumi yang muncul pada masa itu, mendorong Dekker menyatakan bahwa orang Indonesia memerlukan organisasi untuk menyuarakan tuntutan komunitas mereka. Sebuah organisasi dengan jangkauan lebih luas. Organisasi pribumi yang tidak bersifat keagamaan pada September 1912 menyelenggarakan diskusi yang mengutarakan ide pembentukan sebuah organisasi politik.

Indische Partij berdiri di Semarang pada 5 Oktober 1912, yang bertujuan membangkitkan patriotisme semua orang yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya. *Indische Partij* merupakan organisasi politik yang pertama di Indonesia, sekitar 200 orang menghadiri pertemuan guna membicarakan pembentukan organisasi ini (Adam,2004:276). Semenjak berdiri sampai dengan pembuangan tiga pengurus utamanya, IP tidak pernah mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda.

SI (Sarekat Islam) pada akhir 1912 menjadi organisasi massa Indonesia yang pertama dengan anggota lebih dari 100.000 dengan iuran keanggotaan 30 sen pertahun. Pada tahun yang sama SI mengembangkan ke seluruh pulau Jawa, cabang-cabang organisasinya berdiri di beberapa tempat seperti Semarang, Kudus, Malang, Sepanjang, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Bangil, Sidoarjo, Surabaya, Yogyakarta dan Solo. SI merupakan alat organisasi nasional untuk menyuarakan kebencian terhadap tata pemerintahan kolonial dan semua yang melingkupinya, serta berbagai hambatan sosial-ekonomi terhadap masyarakat pribumi.

SI cabang Semarang didirikan oleh R.M Joesoep, seorang klerk disalah satu perusahaan trem dan R. Soedjono seorang sekretaris dikantor keputatian kota

Semarang (1912-1915). SI Semarang mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum dari gubernur jenderal pada tanggal 25 Juni 1915. Gerakan *Sarekat Islam* mencakup berbagai aktifitas yaitu ekonomi, sosial, politik dan cultural. Agama islam berfungsi sebagai ideologi dalam gerakan ini, semangat religius tidak hanya menjiwoinya tetapi juga memobilisasi banyak pengikut.

Organisasi politik yang tergolong revolusioner lahir di Semarang dengan nama *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) pada bulan Mei 1914 oleh Sneevliet. Tujuan pendirian ISDV adalah menentang kolonialisme di Hindia Belanda dan mempropagandakan Sosialisme-demokratis (Ingleson,2004:40-53). Untuk mencapai tujuannya ISDV mendekati kelompok-kelompok pekerja perkotaan, namun karena adanya kecurigaan dari pekerja bumi putera maka strategi ini mengalami kegagalan. Jalan lain yang ditempuh ISDV dalam menarik massa adalah dengan berinfiltrasi ke dalam organisasi massa yang telah berhasil, SI Semarang dan VSTP menjadi sasaran utama ISDV dalam menerapkan strategi *Block Within*.

Vereeniging Van Spoorer Tramweg Personeel (VSTP) didirikan tahun 1908 di Semarang. Sejak tahun 1913 VSTP berada dalam pengaruh Sneevliet seorang sekretaris dari perkumpulan dagang. Sneevliet bersama rekan-rekannya menyebarkan paham komunis dan sosialis dikalangan orang Belanda dan orang Indonesia. Semaun yang menjadi muridnya dapat menguasai VSTP dan SI cabang Semarang pada tahun 1916.

Organisasi-organisasi politik modern yang muncul di Semarang menjadikan pers berorientasi politik, yang berfungsi sebagai alat organisasi-

organisasi Indonesia yang baru bercorak nasionalisme. Perubahan dalam dunia pergerakan dan kegiatan politik di Hindia Belanda menggeliat tajam setelah meletusnya PD I dan revolusi Rusia pada 1917. Sosialisme dan demokrasi muncul sebagai kekuatan baru (Yuliati,2000:33).

Perubahan tersebut menjadikan iklim politik di Semarang berpangkal pada dua sumber yaitu pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini Gubernur Jenderal Limburg Stirum dan dari Sarekat Islam dipimpin oleh Semaoen dengan dukungan dari Sneevliet.

Kota Semarang pada periode 1920 sampai 1925 diwarnai dengan berbagai aksi pemogokan diantaranya yaitu pemogokan buruh percetakan *Vandorp* yang diikuti buruh percetakan lainnya pada awal tahun 1920, pemogokan terjadi lagi pada tahun 1923 yang digerakkan oleh buruh kereta api. Pemberhentian pegawai secara tidak adil menyebabkan terjadinya pemogokan oleh buruh percetakan pada tanggal 21 Juli 1925. Pemogokan rumah sakit Umum Negeri terjadi pada 1 Agustus 1925 dikarenakan angkuh dan kerasnya sikap kepala-kepala bangsa Belanda. Pemogokan juga terjadi di *Semarangsche Setoombooter Prauwenveerm* merupakan sebuah perusahaan pengawas hutan. Banyaknya pemogokan yang terjadi mengakibatkan ditangkapnya sejumlah pemimpin-pemimpin yang dianggap terlibat dalam pemogokan tersebut antara lain Darsono, Ali Archam, dan Marjohan, sehingga pemogokanpun berhenti (Oemar,1994:153).

Aksi pemogokan yang terjadi dalam tahun 1920-1925 mengakibatkan VSTP tidak lagi beroperasi, sebagai gantinya pada bulan Juli 1927 didirikan *Perhimpunan Beamte Spoor dan Tram* (PBST). Perkumpulan tersebut

menyatakan untuk tidak mencampuri kegiatan politik sehingga anggotanya bertambah menjadi 5000 orang (Oemar,1994:153).

ISDV diubah menjadi *Partai Komunis Indonesia* (PKI) pada bulan Mei 1920. partai tersebut diketuai oleh Semaoen dan Darsono sebagai wakil ketua. Orang Eropa anggota ISDV yang tidak setuju kepada Sneevliet telah memisahkan diri dari ISDV dan membentuk perkumpulan sendiri yaitu *Indische Sociaal Democratische Partij* (ISDP).

Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk cabangnya di Semarang pada tahun 1927 dengan pemimpinnya Jatmika, Moch. Sopiana, Sumardi, Kadarusman, Supardi dan Atmo Santosa. Meskipun cabang PNI Semarang mengalami pengawasan ketat dari polisi Belanda, anggotanya semakin bertambah banyak. Rapat umum pertama yang diadakan, dihadiri oleh ribuan rakyat yang menyerukan “Indonesia Merdeka” dan mengibarkan bendera merah putih dengan lambang “Kepala Banteng”. PNI cabang Semarang mengalami penggeledahan dan penangkapan ketika pemimpin PNI cabang pusat ditangkap diantaranya yaitu Soekarno, Maskun Supriadinata, Gatot Mangkupraja.

Partai Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan cabangnya di Semarang tahun 1927, yang dipimpin oleh Sudewa Notowijaya, Sutia, Mulyadi, Rasid, Kasbun, Suwodo, Dawud, Padmo Suskamo. Pada tahun 1928 didirikan Partindo (Partai Indonesia) di Semarang, yang dipimpin oleh S. Ciptoatmosantoso. Dalam tahun 1928 juga didirikan PNI baru cabang Semarang (Oemar,1994:156-157).

Golongan Tionghoa menunjukkan kesadaran politiknya setelah dinasti Manchu tumbang dan diakuinya Tiongkok sebagai negara Republik pada tahun

1911. kesadaran politik yang ditunjukkan oleh orang Tionghoa sebelum tahun 1930 lebih condong pada dua orientasi yaitu pertama, lebih berorientasi pada negara Cina, dan yang kedua lebih berorientasi pada Hindia Belanda, setelah tahun 1930 muncul pergerakan yang lebih berorientasi ke Indonesia (Suryadinata,1982:44).

Golongan Tionghoa di Semarang mengadakan perayaan *Khing Giok Hwee* pada tahun 1911, perayaan ucapan selamat atas berdirinya Tiongkok sebagai Republik. Perayaan tersebut juga diadakan di setiap perkumpulan orang Tionghoa yang ada di Semarang seperti *Siang Hwee, Hwa Yoe Hwee Koan, Soe Po Sah, Tiong Hoa Hwee Koan* dan lain-lain (Joe,2004:239). Perayaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa lebih berorientasi pada negara Cina, dan perkumpulan-perkumpulan yang ada menunjukkan kesadaran politik orang Tionghoa meskipun kegiatan politiknya lebih ditunjukkan dalam bidang pendidikan. Orang-orang Tionghoa juga mengirimkan wakilnya dalam *Volksraad*, tercatat ada 3 orang Tionghoa yang menjadi anggota *Volksraad*. Orang Tionghoa yang ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi pribumi masih sedikit sekali, karena organisasi yang ada pada waktu itu tidak membuka keanggotaan bagi penduduk non-pribumi, jika ada hanya menjadi anggota luar biasa. Organisasi-organisasi pribumi mulai membuka keanggotaan untuk nasionalis Indonesia non-pribumi (Tionghoa) setelah tahun 1930, diprakarsai oleh Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).

Depresi ekonomi melanda dunia pada tahun 1930-an. Indonesia yang amat tergantung pada ekspor minyak bumi dan pertanian, karena 52 % dari produk

diekspor ke negara-negara industri Eropa dan Amerika Utara, krisis ekonomi yang terjadi di kedua daratan ini berakibat dilakukannya kebijakan proteksi secara menyeluruh. Harga-harga yang makin menurun menempatkan Indonesia dalam suatu krisis ekonomi.

Menciutnya pasar dan diberlakukannya kebijakan proteksi mengakibatkan turunnya volume ekspor. Harga gula turun tajam, lahan garapan tebu dikurangi dengan cepat, sehingga banyak pegawai yang diberhentikan dan gaji yang dibayarkan pada industri gula berkurang sampai 90 %. Praktis kesejahteraan penduduk menurun di akhir 1930-an, organisasi kesejahteraan seperti *Muhamadiyah* dan beberapa partai politik mengadakan kegiatan bantuan kesejahteraan pada tingkat desa. Krisis ekonomi berdampak pula dibidang politik karena politik Belanda yang lebih condong ke kanan, Bonifacikus C. De Jong mantan menteri peperangan dan direktur *Royal Dutch Shell* menjabat sebagai Gubernur (1931-1936), menentang semua bentuk nasionalisme dan juga tidak ingin melihat *Volksraad* berperan penting. Rapat-rapat politik orang Indonesia sering dibubarkan oleh polisi dan pembicaranya ditangkap (Ricklefs,2004:384-388).

Krisis ekonomi menyebabkan pemerintah bertindak keras menjaga ketertiban dan keamanan. Pembatasan hak berkumpul dan berserikat diberlakukan, orang-orang yang akan menghadiri rapat-rapat partai diawasi dengan ketat oleh polisi dan adanya larangan bagi pegawai untuk menjadi anggota partai politik. Dalam *Koningklijk Besluit* tanggal 1 September 1919 disebutkan bahwa Gubernur jenderal dapat menyatakan suatu pergerakan atau kegiatannya

bertentangan dengan *law & order* tanpa melalui proses pengadilan. Pergerakan politik yang ingin mempertahankan kelangsungan hidup harus menyesuaikan diri dengan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah. Partai-partai sesudah 1930 terpaksa mengurangi sikap kerasnya terhadap pemerintah dan umumnya bersifat lunak atau moderat (Moedjanto,1991:57-58).

B. Pers dan Kegiatan Politik di Semarang

Kesadaran politik yang bangkit tercermin dari beberapa perkumpulan politik seperti *Sarekat Islam* dan *Indische Partij*, serta munculnya beberapa perkumpulan pribumi lainnya. Dalam periode ini tumbuh pers yang dikelola oleh anak negeri, yang umumnya bersifat pendidikan dan propaganda. Para penerbit dan editor pribumi mulai sadar akan kebutuhan “Persatuan Nasional” sebagai pesan sentral penerbitan pribumi. Surat kabar Melayu yang pada awalnya dipimpin orang Indo atau Eropa yang sangat berpengaruh pada orang Indonesia, pada awal 1911 mulai melemah sampai akhirnya berhenti terbit. *Selompret Melajoe*, Koran melayu yang bertahan paling lama dan sangat kuat, berhenti terbit pada Oktober 1911 setelah 51 tahun bertahan. Kematian surat kabar *Selompret Melajoe* merupakan dampak bangkitnya kesadaran politik orang Indonesia (Adam,2004:267:268).

Kesadaran politik baru pribumi di Jawa menjelang akhir 1913, ditandai oleh pengaruh pers dan kebingungan kalangan surat kabar non-pribumi. Pers Tionghoa yang tergantung pada pembaca Tionghoa peranakan, surat kabar melayu yang dipimpin orang Indo dan surat kabar milik Belanda menyadari pentingnya

mengubah liputan berita, dan untuk itu diperlukan gaya liputan yang obyektif, meskipun tidak bersimpati terhadap gerakan politik pribumi. Semangat baru dikalangan pembaca pribumi memaksa banyak surat kabar yang dikelola orang Indo gulung tikar. Sejumlah surat kabar dan percetakan yang milik orang Tionghoa yang mulai sadar surat kabarnya tidak bisa ditujukan kepada pembaca peranakan dan pribumi menjual peralatan mesin cetaknya. Tumbuhnya surat kabar yang semangatnya politis menunjukkan kemajuan dan modernisasi yang mulai mendapat dukungan. Pertumbuhan pers yang secara tegas berpolitik membantu melahirkan kesadaran politik nasional yang baru. Menjelang akhir 1913 istilah “Indonesische” mulai digunakan oleh sebuah perusahaan percetakan di *weltevreden*, yaitu *Indonesische Drukkerij en Translaat Bureau* (percetakan Indonesia dan biro terjemahan) yang berada di gunung Sahari (Sinar Djawa, 2-4-1914, & Adam, 2004:295-297).

Semarang suatu kota yang berkembang pesat pada awal abad ke-20 menjadi pusat kegiatan radikal. Suasana dikota ini dapat dikatakan lebih radikal daripada suasana dikota-kota besar lainnya di Jawa. Semarang merupakan pusat kepentingan-kepentingan dagang bangsa Eropa yang berharap dapat mengembangkan jaringan pemasaran di Jawa. Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk mencapai tujuan politis etis yaitu meningkatkan standar kehidupan rakyat di Hindia Belanda (Yuliati, 2000:3).

Pengaruh liberal dan faktor sosial di kalangan rakyat bumiputera juga ikut menentukan perkembangan radikalisme di Semarang. Semarang yang merupakan kota pemerintah kota pelabuhan dan kota perdagangan, tentu memiliki sejumlah

besar kantor perusahaan swasta dan pemerintah ini berarti jumlah pekerja atau buruh cukup banyak, diantaranya berasal dari daerah-daerah lain seperti Demak, Jepara, Surakarta, Yogyakarta, Kedu, dan Bogelan. Para buruh tersebut bekerja sebagai buruh kereta api, pelabuhan, perkapalan, dan pabrik-pabrik. Kondisi buruh yang miskin merupakan faktor yang memudahkan masuknya paham marxis yang mengajarkan bahwa buruh tidak bekerja untuk memuaskan kebutuhannya, tetapi untuk memuaskan kebutuhan para majikan kapitalis yang memeralat kaum buruh demi memperoleh keuntungan. Di negara kapitalis, perlu diciptakan gerakan rakyat, karena dinegara tersebut terdapat kontradiksi antara kelas buruh dan kelas borjuis yang menindas. Penindasan tersebut harus dilawan oleh gerakan rakyat yang harus dipimpin oleh kaum buruh sendiri (yuliati,2000:3-4).

Surat kabar *De Locomotief* menyebarkan ide-ide etis secara gencar di Semarang. Tokoh-tokoh etis terkenal Pieter Brooshoft, Vierhout, Stokvies, dan Lievegood pernah bekerja sebagai redaktur *De Locomotief*. Penganut politik etis tersebut menuntut pemerintah untuk meningkatkan kehidupan sosial dan intelektual masyarakat bumiputera dengan tujuan akhir pemerintah sendiri.

Pieter Brooshoft yang paling berpengaruh diantara tokoh etis yang ada. Brooshoft datang di Hindia Belanda pada tahun 1877, dan menjadi pemimpin redaksi *Semarangsche Courant*, kemudian memegang jabatan yang sama pada *Surabaja Courant* pada tahun 1880, yang terakhir Brooshoft ditunjuk menjadi redaktur *De Locomotief* bertahan sampai 10 tahun. Melalui *De Locomotief* orang dapat mempelajari pemikiran-pemikiran politis Pieter Brooshoft. Dalam *De Locomotief* 17 maret 1887, Brooshoft mengemukakan tuntutanannya yakni

pemisahan antara kekuasaan legislative di Hindia Belanda dan di negara Belanda sama seperti yang dilaksanakan di British-India. Untuk itu Brossoft menghendaki di Nederland ada menteri untuk daerah jajahan, suatu dewan kolonial dengan kekuasaan legislative yang diangkat oleh raja dan hanya mempunyai kewenangan kontrol formal di parlemen. Selanjutnya Brooshoft mengemukakan pikirannya tentang masalah desentralisasi. Dalam hal ini ia mengusulkan agar setengah jumlah anggota Dewan Karisidenan (*gewestelijke raad*) dan Dewan Kota (*gementeraad*) berasal dari bukan *ambtenaar* dan setidaknya sepertiga dari jumlah anggota berasal dari kalangan bumiputera yang terpelajar, sehingga mereka dapat menentukan anggaran belanja lokal dan masalah-masalah lain dari daerah setempat (Yuliati,2000:63-65).

Surat kabar *De Locomotif* yang terbit pada tahun 1915 dengan jelas menulis, bahwa bangsa timur (Indonesia) sudah berlainan dengan waktu sebelum perang jepang-rusia, maka *pak kromo* bukanlah lagi *pak kromo* seperti sebelum tahun 1900-an. Kaum terpelajar lebih banyak memperhatikan persoalan-persoalan mengenai rakyatnya. Banyaknya orang yang mulai membaca surat kabar, maka banyak yang mulai memikirkan dan membanding-bandingkan, selanjutnya timbul perasaan akan haknya disamping kewajibannya. Mulai ada pandangan bahwa sebenarnya pegawai adalah untuk rakyat dan bukan sebaliknya, dorongan ke arah pergerakan (aksi) semakin kuat, dan orang sudah tidak lagi mulai serba tunduk serta taat saja dibawah tekanan penjajah (Kartodirjo,1968:68).

Semarang merupakan salah satu tempat perkembangan kehidupan politik dan jurnalistik yang penting dalam era pergerakan. Berbagai organisasi yang

berkembang dikota ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan persuratkabaran. *Sarekat Islam* Semarang mempunyai surat kabar *Sinar Djawa* (1914-1918), surat kabar ini dibeli dari firma Hoang Thaij & Co. Nama *Sinar Djawa* tetap dipakai oleh *Sarekat Islam* Semarang untuk penerbitan selanjutnya, dalam kop harian ini dijelaskan bahwa *Sinar Djawa* merupakan organ bagi bumiputera dan segala bangsa. Nama percetakan dan penerbitnya adalah *N.V Handel Maatschappij dan Drukkerij Sarekat Dagang Islam Semarang merk Sinar Djawa*. Pada tahun pertama disebutkan bahwa pemimpin redaksinya adalah P.H. Koesoemo dan redaktornya yaitu Mohammad Joesoef dan Saleh Handjomo (Yuliati,2000:65-66).

Surat kabar *Sinar Djawa*, menurut isinya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian. Halaman 1 memuat ulasan-ulasan redaksi, artikel-artikel kiriman dari pembaca, laporan-laporan pergerakan *Sarekat Islam*, kritik dan lain-lain. Halaman 2 berisi lanjutan berita dari halaman 1 (bila perlu), kabar Semarang, berita tentang peristiwa sehari-hari dan kadang-kadang juga ada berita luar negeri. Halaman 3-4 berisi advertensi.

Perubahan nama terjadi pada tanggal 1 Mei 1918 yaitu dari *Sinar Djawa* menjadi *Sinar Hindia* yang mempunyai makna, *api yang akan menerangi si gelap* di seluruh Hindia. Perubahan nama terjadi tidak hanya untuk kepentingan rakyat di tanah Jawa, namun juga untuk kepentingan rakyat diseluruh Hindia. *Sinar Hindia* di pakai rakyat Hindia untuk berperang, perang dengan pena melawan musuh rakyat Hindia yaitu kaum kapitalis dan kaum-kaum yang masih berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat Hindia (Yuliati,2000:73).

Mengenai perubahan nama tersebut *Sinar Hindia* menerangkan, “kita meroebah haloean redaksi, jaitoe beriktir sekeras-kerasnja oentoek mentjapai kemerdekaan Hindia, tidak sadja dalam bidang politiek, tetapi djoega dalam pentjaharian hidoep (ekonomi) Hindia merdeka memerintah negerinja sendiri dan merdeka sama rata boeat rakjatnja dalam pentjaharian penghidoepan” (*Sinar Hindia*,1-5-1918,No.89).

N.V. Handel Maatschappij & Drukkerij Sarekat Dagang Islam Semarang merk Sinar Djawa, mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mengiklankan peminjaman obligasi pada tanggal 30 Juni 1923, namun sebelum usaha ini tercapai N.V ini sudah tertimpa kondisi-kondisi yang meruntuhkan kehidupannya. Drukkerij VSTP Semarang mengambil alih penerbitan. *Sinar Hindia* dan percetakannya pada tanggal 29 September 1923. Terjadi perubahan nama pengelola, penerbit *Sinar Hindia* tidak lagi *Sarekat Islam Semarang*, melainkan *Sarekat Rakyat Semarang*, dan percetakannya tetap sama yaitu Drukkerij VSTP Semarang. Pergantian penerbit ini mengikuti pergantian nama *Sarekat Islam Merah* menjadi *Sarekat Rakjat*. Tidak lama kemudian nama *Sinar Hindia* sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan API pada tanggal 1 Agustus 1924 (Yulianti,2000:69-73).

Sinar Djawa-Sinar Hindia mengetengahkan pandangan ide dan kritik mengenai kondisi sosial politik dalam era pergerakan rakyat di Hindia Belanda sesuai dengan haluan politik para redaktornya. *Sinar Hindia* selain menjadi organ SI, sejak tahun 1920 mulai menyuarakan kepentingan *Partai Komunis Hindia* (PKI), sebagai contoh: dalam *Sinar Hindia* no.245 27 Desember 1920

memberitakan rapat PKI yang berlangsung tanggal 24-25 Desember 1920 di kantor *Sarekat Islam* Semarang.

Nasionalisme Indonesia, wujud bangkitnya kesadaran politik dapat dilihat dari banyaknya organisasi politik pribumi. Hal ini menggelisahkan penguasa Eropa, orang Tionghoa bahkan sampai priyayi. Sepucuk surat pembaca di surat kabar milik Tionghoa "Djawa Tengah" yang terbit di Semarang, mencerminkan perasaan banyak orang (Tionghoa) yang menentang *Sarekat Islam* (Adam,2004:285).

Anak boemi jang telah masoek lid S.I banjak jang merasa telah terlepas dari bawah bendera tjorak tiga, dengan kerasa menjangka bahwa kini keradjaan Turky jaitoe keradjaan islam atawa keradjaan soetji...Memilih hal ini kita tentoe tiada heran bahwa anak boemi sekarang laloe banjak jang tiada soeka pandang sebelah mata pada pegawe gouverment poela, sedenga permoesoehan antara amal boemi dan bangsa T.H. itoe tiada lain dari pendapat orang-orang panggila agama, sebab pendapatnja, besarlah gandjaran kaoem moeslimin jang dapet memboenoeh bangsa-bangsa jang kafir. Brr!!...Inget, bangsa T.H. oerang asing pada moela-moelanja, tapi kini telah boleh kami seboet anak boemi djoea, kerna kami taoe marika itoe, tentoelah banjak tertjampoeran dengan darah Djawa. Sedeng pengidoepan marika itoe hampir rata-rata berdagang, kerna pada doeloan, Gouv. Kita misih memantangi keras, atau lebih teges baik kami seboet mengiket tangan dan kaki marika itoe, djadi lain dari pada hidoep dengan dagangan, sama sekali tidak bisa berichtiar lain boeat mentjari sesoeap nasi. Meskipun demikian sebagaimana sering dikatekan dalam ini dagblad, sebab bangsa itoe memang dilekati natuur dagang, maka kami rasa tiada bisa anak boemi aken mematiken perdagangannja....Zaman doeloe, sebelum ada orang asing sampe ditanah Djawa, anak boemi misih liar, tetapi lama-lama semadjak banjak orang asing sampe disini, orang Djawa makin baik, lantaran ia dapet adjaran roepa-roepa ilmoe dan roepa-roepa kesopanan (Djawa Tengah,3-10-1913).

Sinar Djawa 19 januari 1918 no.16 berkomentar tentang orang yang terpilih menjadi anggota *volksraad* satu-persatu, pada saat pemilihan anggota *volksraad*.

Bangsa Belanda:

1. Bosscha, Kapitalist thee onderming Malabar, Pro Indie Weerbar.
2. Mr. Dr. Schumann, dikata asih sama Boemipoetera, ambtenaar Goepermen.
3. Van Der Jagt, idem.
4. Mr.Jacobs, Kapitalist besar, jang pada 31 Aug. 1914 minta kepada Gouvernement Generaal Idenburg soepaja SI ditindas.
5. Ketner, Kapitalist besar di Deli, tida kita orang kenali sebagai politicus.
6. Mr.Gerretsen, directeur Javasche bank, Conservatief (golongan tida soeka pada madjonja rakjat), kapitalist besar pegang oeroesan bank-bank.
7. Mr.Stibbe, Resident Pekalongan, terkenal sebagai ethicus.
8. Witlan, ass.Resident di Padang, idem.
9. V.Hinloopen Laberton, menggerakkan Indie Weerbar, bikin onar koempoelan-koempolan Boemipoetera sebab haloeannja bikin riboet sadja dan tida bergoena, tida soeka mengakoei jang kapitalist goela itoe djahat sekali boeat keperloeannja Boemipoetera, ambtenaar goeperment.

Diantara 9 Belanda ini tida ada satoe jang boleh dibilang akan membela Boemipoetera sekeras-kerasnja, djadi tida ada satoe wakil rakjat.

Bangsa Boemipoetera:

10. R.M.T.A. Koesoemo Oetojo, regent dari Jepara, dapat pengajaran tinggi, tetapi tida pernah merasakan sendiri soesah pajahnja penghidoepannja si Kromo., regent dari Ponorogo, idem.
11. R. Ng. Radjiman, satoe petjinta bangsa, bisa accord dengan bangsa belanda, haloean
12. P.A.A.A. Djajadiningrat, regent dari Serang, idem.
13. R.A. Koesoemodjoedo lembek, selamanja pelan-pelan, tida soeka rakjat kecil berkelahi keras boeat keperloeannja sendiri.
14. R.A. Atmodirono, salah satoe pembesar Indie Weerbar.
15. Abdoel Moeis, ondervoorzitter CSI, pembesar jang besar dari Indie Weerbaar, tida soeka kaloe rakjat berkelahi keras boeat keperloeannja.
16. R. Sastrowidjojo, lid hooftbestuur Boedi-Oetomo, tida kenali betoel.
17. Waworoentoe, menado, djoega tida kenali betoel.
18. Dr. Abdoel Rivai, amat lama di negeri Belanda, doeloenja joernalist jang pinter, tetapi sekarang tida begitoe terkenal lagi, sebab boleh dibilang “bosen” bertjampoer gaoel dengan kaoem kromo.
19. Raden Kamil, betoel bidjaksana, tetapi orang djaman koeno jang kromo tida begitoe kenal, djadi tida bisa mengakoei wakilnja.

Terangnja diantara 10 toean ini tida satoe jang oelh kromo boleh dibilang “penekat” jang menjerahkan djiwa goena membela kaoem kromo, sebab tida toeroet berkeromoen-keroemoen dalam gerakan si Kromo, kebanyakan membela dengan djalan tengah-tengah, biar tida digasak

sampai toempes oleh moesoehnja Kromo, jaitoe kaoem kapitalist dan kekoesaan serta peperintahnja kaoem kapitalist ini (Yuliati,2000:130-34).

Kota Semarang dilanda pemogokan kaum buruh percetakan: “Van Dorp”, “De Locomotief”, “Misset”, “Benjamin”, “warna warta”, dan “Bischof” pada awal tahun 1920. Berita tentang pemogokan ini disiarkan secara lengkap dalam sinar hindia 24 Februari 1920, no.38, mahalny segala kebutuhan hidup pada masa itu setelah perang menyebabkan para zetter dan buruh cetak di percetakan “Van Dorp” menuntut kenaikan gaji. Buruh dengan didukung SI bagian buruh percetakan mengemukakan tuntutan kepada pengusaha percetakan pada pertengahan Januari 1920, namun permintaan tersebut ditolak pada tanggal 6 Febuari. Buruh Van Dorp yang berjumlah sekitar 400 orang melaksanakan pemogokan pada tanggal 7 Febuari karena penolakan tersebut, yang kemudia disusul buruh percetakan lainnya sehingga berjumlah 1000 orang (Yuliati,2000:170-173). Pemogokan diserukan melalui *Sinar Hindia*, “Teruskan pemogokan !! kami akan membantumu! Orang tahu bahwa matinya De Locomotief dan percetakan lainnya akan mematikan juga suara kapitalis yang menindas kita dan merusak politik pemerintah” (*Sinar Hindia*, 24 Febuari 1920,no.38).

Pegawai percetakan yang merupakan orang pribumi, tidak masuk kerja ketika pemogokan berlangsung, sehingga redaktur *De Locomotief* (waktu itu adalah Tn. Lievegood) sendiri ikut membantu membagikan surat kabar. *Het Daagblad* yang mencoba memberi bantuan pada *De Locomotief* pada 26 Febuari 1920 mogok, sehingga terbit satu lembar gabungan surat kabar dengan dua nama.

Warna Warta mencoba memberi bantuan juga mogok, sehingga ketiga surat kabar terbit setengah halaman dengan tiga nama surat kabar, isinya setengah Belanda dan setengah Melayu, kemudian terbit satu halaman setelah beberapa hari. *Djawa Tengah* juga terkena pemogokan meski tebit dengan ukuran kecil namun terbit dengan nama sendiri, karena menggunakan zetter (tukang set huruf) dan drukker (percetakan) Tionghoa (Joe,2004:282))

Semaoen ke Surabaya dan berbicara dengan Tuan Bergsma (ISDP) untuk meminta agar jangan ada buruh yang mau dikirim ke Semarang membatalkan aksi mogok. Diadakan pertemuan dengan para zetterbond (gabungan tukang zetter huruf) dan perkumpulan buruh lain diantaranya *Tionghoa Keng Kie Hwe*, pertemuan tersebut memutuskan untuk tidak bersedia dikirim ke Semarang. Kaum buruh Tionghoa juga sepakat tidak bersedia dikirim ke Semarang.

Sinar Hindia menerbitkan halaman extra yang dijual f.0,10,- per eksemplar, hasilnya digunakan untuk mendukung para pemogok. Mulai tanggal 11 Maret para buruh merasa keberatan karena tidak mendapat dukungan yang mencukupi, sedangkan mereka punya tanggungan anak dan istri, sehingga diantara pemogok mulai ada yang mengajukan bekerja lagi. *Drukkerij Bischof* keluar dari *patronenbond* (perserikatan kaum majikan percetakan Eropa) pada tanggal 21 maret 1920, dan mulai menerima kaum pemogok untuk bekerja kembali. *Drukkerij Misset* juga mengambil langkah yang sama, sampai pada akhirnya *patronenbond* pecah. *Het Dagblad* merasa tidak senang terhadap Tuan Lievegood dan menuduhnya sebagai orang yang membuat persatuan itu hancur. Surat kabar

Belanda di daerah lain juga menyatakan tidak senang dengan sikap Tuan Lievegood yang mau mengalah (Joe,2004:283-84).

Pemogokan terjadi lagi di Semarang pada tahun 1923 yang digerakkan oleh buruh kereta api karena adanya pengurangan pendapatan pegawai. Semaoen sebagai ketua VSTP Semaoen mengatur strategi agar tuntutan didengar oleh pimpinan jawatan kereta api, namun tuntutan-tuntutan tidak dipenuhi, dan Semaoen ditangkap pada tanggal 8 Mei 1923. Pemogokan masih terus berlangsung dan mulai menyebar ke sektor lain seperti di pasar-pasar Semarang, bengkel, sopir taksi, bahkan meluas ke beberapa daerah lain yaitu Kertosono, Kediri, Wonokromo, Sidoarjo, Ponorogo, Jombang, Madiun, Surabaya, Bangil, Pasuruan, Malang, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Kudus.

Pemerintah kolonial Belanda menindak tegas siapa saja yang dianggap menghasut dan mendukung pemogokan. Pada tanggal 10 Mei 1923 diumumkan berlakunya pasal 161 bis *Straf Wetboek*, “Barang siapa yang bertujuan untuk merusak ketertiban umum dan mengacaukan kehidupan ekonomi masyarakat, atau mengetahui bahwa tindakannya itu akan merusak ketertiban umum dan akan mengacau kehidupan ekonomi masyarakat, juga menyebabkan banyak orang mengabaikan atau menolak bekerja pada dinas di mana mereka telah terikat bekerja, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman denda paling tinggi sebanyak f.1000”. Dengan adanya pengumuman ini, maka VSTP terpaksa memberhentikan pemogokan (Yuliati,2000:179-184).

Pemogokan yang terjadi di Semarang dalam tahun 1920-1925, mendorong pemerintah mengeluarkan keputusan pelarangan untuk mengadakan *vergadering*

(rapat atau pertemuan) di kota Semarang. Berikut ini kutipan pengumuman tersebut yang dimuat dalam surat kabar *Api* pada tanggal 6 Agustus 1925.

Chef Recherche mengumumkan mulai ini hari dalam kota Semarang tidak boleh diadakan *vergadering-vergadering*.
(Toh pergerakan tidak berhenti karena itu!Red).

Asisten residen menerangkan bahwa pelarangan itu diadakan karena pemerintah Hindia Belanda merasa ketertiban dan keamanan di kota Semarang telah terganggu dengan adanya berbagai aksi pemogokan yang terjadi. Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan itu VSTP dijaga ketat dan *Hoofd Commisaris Van Politie* (ketua komisarisi polisi) datang dua kali dikantor VSTP untuk melihat apakah larangan *vergadering* dilanggar atau tidak (Si Tetap, No. 7-8, 31 Juli dan 31 Agustus 1925). VSTP akhirnya tidak beroperasi lagi pada akhir tahun 1926.

Perhimpunan Pegawai Negeri Sekolah Rendah dibawah pimpinan Tjahjo Prmono menerbitkan *Soeara Setalian* dalam tahun 1919, *Vereeniging Voor Spore en Tramweg Personeel* (VSTP) menjadikan *SI Tetap* sebagai organ politiknya yang mulai terbit dari tahun 1918 sampai tahun 1924, *Persatuan Hindia* terbit antara tahun 1919-1921 merupakan media pergerakan *Nasional Indische Partij*, dan *Api* menyuarakan kepentingan PKI (Yuliati, 2000:3). *Insulinde* menerbitkan surat kabar *Goentoer Bergerak* (1915), kepala redaksinya adalah Marco, dan redaktur administrasinya Darna Koesoema. Surat kabar ini terbit satu minggu sekali setiap Sabtu. *Goentoer Bergerak* terbit dengan menggunakan bahasa Belanda dan Melayu, disetiap halaman surat kabarnya, setengah terbit dalam bahasa Belanda dan setengahnya lagi dalam bahasa Melayu. Pada halaman

terakhir surat kabar ini berisi advertensi. Pada kop halaman pertama ditulis bahwa surat kabar ini merupakan organ bagi bangsa Hindia.

Berbagai surat kabar politik yang berkembang di kota Semarang merupakan dampak dari perkembangan politik yang ada, dan wujud dari munculnya kesadaran politik dengan munculnya nasionalisme Indonesia. *Pers bumiputera* merupakan sumber untuk mengetahui pergerakan politik yang ada di Semarang. Surat kabar tersebut banyak memuat ide-ide dan kritik yang ditulis oleh tokoh-tokoh pergerakan sehubungan dengan kondisi-sosial ekonomi masyarakat kolonial di Semarang.

Surat kabar penting artinya bagi pergerakan, hal ini tercermin dalam kalimat Darsono sebagai berikut: “Rakyat Jawa masih bodoh, untuk menyadarkannya diperlukan cambuk, yaitu artikel-artikel (tulisan) yang berani. Tulisan-tulisan yang logis dan ilmiah tidak ada gunanya karena tidak dipahami oleh rakyat sekarang ini yang diperlukan adalah orang-orang berani, bukannya orang yang terdidik dan pandai”. “Orang yang berani menunjukkan gigi, bukannya lidah”, kata Mas Marco (SD,27-10-1917). Banyak tulisan-tulisan para jurnalist sekaligus orang pergerakan yang menyebabkannya dipenjara, namun hanya itu jalan yang bisa ditempuh. Suwardi Suryaningrat bersama Dr. Tjipto Mangunkoesoemo, dan Douwes Dekker ketika menulis “Als Ik Een Nederland Was” (seandainya aku orang belanda), pernah melakukan cara-cara keras melalui surat kabar. Suwardi tetap melakukan *Shock Therapy* terhadap pergerakan rakyat agar bertambah militan dan tegas, meskipun telah diperingatkan oleh Abdoel Moeis (Gie,2005:34).

C. Sikap Kaum Pergerakan Terhadap Kebijakan Pemerintah Belanda Mengenai Pers

H.J.F.M.Sneevliet seorang tokoh perburuhan Belanda datang di Indonesia pada bulan Februari 1913. Sneevliet dikenal sebagai propagandis yang berpengaruh di Belanda, dan menjadi ketua *Social Democratische Arbeiders Partij*. Tujuan kedatangannya di Indonesia untuk mencari pekerjaan. Sneevliet pindah ke Semarang untuk menggantikan kedudukan rekannya D.M.G Koch sebagai sekretaris *Handelsvereniging* pada bulan Mei 1913.

Sneevliet bersama rekannya J.A Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mengambil inisiatif untuk mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) pada bulan Mei 1914 di Surabaya. Sneevliet juga menjadi editor *De Volharding* surat kabar berbahasa Belanda di Semarang yang menjadi organ VSTP. VSTP mulai menerima anggota bumiputera atas saran Sneevliet dalam tahun 1913, dengan pertimbangan pada saat itu jumlah pegawai bumiputera yang terpelajar dan cakap cukup banyak. Setahun setelah kedatangan Sneevliet di Semarang, berhasil mengarahkan VSTP untuk bergerak secara radikal guna memperbaiki nasib pegawai-pegawai bumiputera yang tidak cakap dan miskin (Yuliati,2000:6-7).

Revolusi Rusia yang terjadi pada Februari 1917 hingga Oktober 1917, berita mengenai revolusi ini ditulis oleh Sneevliet, dengan judul artikel “Zegepral” (kemenangan). Tulisan ini kemudian diserahkan pada redaksi *De Indier* (Organ NIP-Nederland Indische Partij). Later penanggung jawab organ itu memperlunak

tulisan Sneevliet dengan persetujuannya. Berikut kutipan terjemahan tulisan Sneevliet yang diterjemahkan oleh Semaoen.

“Apakah Soeara-soeara boengah masoek dalam kota desa dalam ini negeri? Di sini hidoeplah soeatoe ra’jat, dalam negeri jang terkaja sendiri. Di sini hidoeplah soeatoe ra’jat, miskin, bodo. Di sini hidoeplah soeatoe ra’jat mengeloearkan kekajaan jang soedah bertahoen mengalir (ke) kantong-kantongnja bangsa jang memerintah, kantong-kantong di Eropah Barat, teroetama pergi sama negeri ketjil jang ada di sini pegang kekoesaannja politik. Di sini hidoeplah soeatoe ra’jat jang menoeroet sadja dengan lembek. Koempoelan politik dilarang ... hak biking *vergadering* disanggoepi, tetapi beloem diadakan teroes, pertimbangan (kritiek) dalam soerat kabar diantjam oleh justitie jang berat sebelah, sebab itoe justitie kepoenjaannja jang memerintah daja oepaja bergerak dilawan dengan keboeasannja pemboeangan. Pergerakan politiek hanya diperkenankan kalau itoe pergerakan keponjaannja jang memerintah, sebagai bikin maloe pada ra’jat ... seompamanja pergerakan memperkoet balatentara boeat melindoengi tanah air, tanah air jang mana soedah diambil dari tangannja ra’jat oleh pemerintah asing. Di sini hidoeplah soeatoe ra’jat jang sabar, soeka menoeroet sadja bertahoen-tahoen....dan sesoedahnja Diponegoro tidak ada satoe pemoeka jang menggerakkan ra’jat boeat pegang nasibnja sendiri dalam tangannja sendiri. Ra’jat Djawa Revolutie di Rusland djoega memberi tjontoh pengadjaran pada kamoe. Djoega ra’jat dapat kemenangan lantaran berkelahi teroes meneroes memosoehi (i) pemerintah boeas dan boedjoekan. Djoega di negeri Rusland koempoelan-koempoelan kaoem boeroerh jang memprtimbangani itoe perkoempoelan-perkoempoelan. Pekerdjaan oentoe mentjapai kemerdekaan jalah pekerdjaan berat.

Pekerdjaan ini tidak bisa berboeat dalam tengah-tengah, djalan kekoeatiran atau djalan koerang tetap, pekerdjaan ini meminta seloeroeh djiw, keberanian, jalan keberanian nomor satoe. Apakah soeara-soeara boengah sebab kemenangan itu masoek di hati kita? Apakah terlebih kentjang dan keras dja oepaja si penjiar-penjiar benih boeat menggerakkan keras gojangnya ra’jat berpolitiek da berichtiar dalam pentjarian hidoepnja. Dan apakah ia teroes sadja bekerja menanam benih meskipun beerapa benih djatoeh di batoe-batoe dan tjoekoel sedikit sadja. Dan apakah ia teroes sadja brtentangan dengan daja oepaja tindasan atas kemerdekaan pergerakan?maka tida lainlah ra’jat Rusland jalan kemenangan” (Gie,2005:18-20).

Sneevliet kemudian di sidang dengan tuduhan menghasut rakyat Jawa, menghina pengadilan menuduh pemerintah berbuat sewenang-wenang dan

tuduhan semacamnya. Persidangan di mulai pada akhir November 1917. Pada tahap pertama pergerakan nasional, proses pengadilan politik sangat penting artinya bagi pergerakan nasional. Dalam sebuah persidangan terbuka, terjadi debat antara terdakwa dan penuntut. Terdakwa biasanya membela rakyat, sedangkan penuntut selalu mewakili kepentingan pemerintah. Pengunjung persidangan biasanya para wartawan dan kader-kader politik yang belajar tentang cara-cara berdebat dan menjatuhkan argumentasi lawan. Sneevliet terkenal sebagai orator dengan gaya meyakinkan yang berhasil menunjukkan kejahatan sistem kolonial di Indonesia. Selama persidangan berlangsung, kolom-kolom surat kabar di Semarang memuat jalannya perdebatan. Bagi pembaca Indonesia pemuatan itu sangat menarik karena kebohongan pemerintah di soroti. Sneevliet akhirnya dinyatakan bebas dan diusir dari Hindia Belanda (Gie,2005:20-21).

Semaoen seorang tokoh politik dan jurnalis yang terkenal sangat radikal dalam mengangapi praktik-praktik kolonialisme di Hindia Belanda. Semaoen lahir di Mojokerto dalam tahun 1899, putera pegawai kereta api. Setelah lulus sekolah bumiputera kelas satu, Semaoen bekerja di *Staat Sspoor* (SS) sebagai juru tulis dalam tahun 1912.

Semaoen meninggalkan pekerjaannya di SS untuk menjadi propagandis VSTP dan menjadi editor *SI Tetap* surat kabar berbahasa Melayu organ VSTP. Semaoen juga menjadi propagandis dan komisaris SI Semarang. Dalam masa penjajahan sudah menjadi fenomena bahwa para pemimpin pergerakan sering memanfaatkan pers sebagai media pergerakan, Semaoen menjadi redaktur harian *Sinar Djawa dan Sinar Hindia*. Sampai dengan awal dekade ke-3 abad ke-20,

terbuka kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi anggota berbagai organisasi, sehingga ketika *Partai Komunis Hindia* (perubahan nama dari ISDV) dibentuk pada tanggal 2 Mei 1920 Semaoen dapat dipilih sebagai ketua organisasi tersebut. Semaoen juga terpilih sebagai ketua PPKB yang di bentuk bulan Desember 1920 (Yuliati,2000:9-10).

Semaoen mulai masuk dalam jajaran redaksi *Sinar Djawa* pada tanggal 19 November 1917 sebagai redaktur bagian politik, dan menjabat sebagai direktur penerbitan ini pada tanggal 1 Mei 1918. Dibawah pimpinan Semaoen harian *Sinar Djawa* semakin meninggalkan sikapnya yang lunak, menjadi radikal.

Semaoen diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 1919, akibat tulisannya dalam *Sinar Hindia* 16 Nopember 1918 yang berjudul “Bala Tentara dan Pertoendjoekan Koeasa”, tulisan ini merupakan karangan Sneevliet yang diterjemahkan oleh Semaoen dalam bahasa Melayu. Semaoen difonis penjara selama 4 bulan (Yuliati,2000:204).

Berikut ini merupakan cuplikan proses persidangan Semaoen yang dimuat dalam *Sinar Hindia* 15 Maret 1919 No.52, pengadilan negeri terdiri atas Mr.A.S.Block (presiden), Prawirohadinoto dan Koesnoen (anggota), Djojomiharjo (kepala jaksa), Moektar (pengulu), Soedirman (sekretaris).

Presiden : apa pendapat kamoie tentang itoe karangan?

Semaoen : Saja terangkan bahwa karangan itoe tidak berbahaja.

Presiden : Itoe karangan soepaja soldadoe mogok perintah?

Semaoen : tidak, hanja bermaksoed soepaja soldadoe djangan gampang memboenoeh oerang.

Presiden : Djadi kalau soldadoe disoeroeh memboenoeh djangan soeka?

Semaoen : Tidak begitoe, Toean presiden barangkali soedah dengar bahwa baroe-baroe ini di Flores soldadoe dilepas begitoe sadja dengan dipersanggupi premi f.250 boeat satoe orang jang ia boenoeh sebab ia sangka berontak. Ketarik oleh itoe premie,

soldadoe bisa memboenoeh ngawoer sadja, asal dapat itoe premie. Saja koeatir kalau di sini rakjat brontak, dan ada pemboenoehan ngawoer. Soldadoe tidak oesah boenoeh tetapi tjoekoeop menangkap.

Presiden : Disoeroeh membunuh tetapi menangkap, itoe toch mogok perintah memboenoeh.

Semaoen : Tidak, sebab tidak diperintah siapa orang mesti diboenoeh. Bisa djoega orang jang tidak salah apa-apa keliroe diboenoeh. Dari itoe, saja bilang “djangan gampang memboenoeh”.

Presiden : Dalam itoe karangan ada perkataan menipoe. Siapa menipoe?

Semaoen : Fabriek goela, orang-orang atau klas kaoem oeang.

Presiden : Karangan menjeboetkan wakilnja kaoem oeang jang menipoe, djadi kamoe menghina pemerintah?

Semaoen : Betoel pemerintah wakilnja kaoem oeang.

Presiden : Djadi kamoe mengakoe pemerintah terhina?

Semaoen : Toean Presiden, disini ada salah mengerti. Saja bilang: betoel pemerintah wakilnja kaoem oeang, orang fabriek (goela oepama) menipoe. Saja bilang jang sebetoelnja, djadi boekan perkara penghinaan, tetapi perkara kebenaran.

Presiden : Boekti?

Semaoen : Fabriek goela emmberi oeang premie pada loerah boeat setiap bae tanahnja orang desa jang disewakan. Loerah menggoenakan kekoeasaannja boeat paksa haloes soepaja tanah disewakan, sebab ia tjari persen.

Presiden : Toch loerah jang menipoe?

Semaoen : Betoel, tetapi fabriek tahoe hal ini en toch beri premie teroes. Dengan pengetahoean itoe ia berboeat tipoean, dengan tegas : fabriek menipoe haloes-haloesan.

Presiden : Dalam karangan itoe pemerintah dihina : diperingatkan dengan keras, masih sadja beloem menambah bekal makanan di Hindia: penghinaankah ini?

Semaoen : Boekan tetapi perkara sebetoelnja.

Presiden : Boekti?

Semaoen : Permoelaan tahoen 1918 soedah ada gerakan pada pemerintah soepaja tanaman teboe dikoerangi biar makanan bisa ditambah (Sinar Djawa,15-4-1919,No.52).

Semaoen diputuskan dipenjarakan di Yogya agar mendapat penanganan sebagai bangsa Belanda. Semaoen mulai menjalani masa hukumannya sejak 24 Juli 1919 (Yuliati,2000:209).

Mas Marko Kartodikromo juga salah seorang jurnalis yang sering mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisannya di kolom-kolom surat kabar. Marco lahir pada tahun 1890 di Cepu, dan mulai bekerja di *Nederlands Indische Sporweg* (NIS) pada tahun 1905. Marco mulai bergabung dengan surat kabar *Medan Prijaji* di Bandung bersama Tjipto Mangoen Koesoemo dan Darna Koesoemo di Surakarta. Marco menerbitkan *Doenia Bergerak* organ IJB di Surakarta (1914-1915), dan *Goentoer Bergerak* organ *Insulinde* di Semarang.

Marco seringkali berurusan dengan delik pers, dalam *Doenia Bergerak* ia terkena delik pers tentang 4 artikel sekaligus, akibatnya Marco difonis 8 bulan penjara. Marco dituduh melanggar ps. 66 a & b *Straf Wetboek*. Sehubungan dengan kasus Marco tersebut, kaum pergerakan mendirikan sebuah komite untuk mengajukan permohonan pemerintah supaya hukuman bisa diringankan dan minta supaya pers melayu diberi keleluasaan karena dengan adanya pasal-pasal 63 a, 66 a dan b dalam *Wetboek van Strafrecht* membuat surat kabar seperti disumbat. Komite tersebut dibentuk di rumah H. Sneevliet di Gergaji, pada tanggal 10 Januari 1916 yang terdiri dari: D.J.A. Westerveld (ISDV), H. Sneevliet (ISDV), G.L. Toope (Insulinde), R. Pramoe (Insulinde), Zimmerman V. Wusih (VSTP), Joesoef (VSTP), Bransteder (Marinebond), Soeharjo (Porojitno), Tjipto Mangoen Koesoemo (IJB), K.T. Kwee (Dagblad Djawa Tengah) (Joe, 2004: 258-259). Marco akhirnya di masukkan dalam penjara "Mlaten" Semarang selama 100 hari.

Perang pena antar tokoh pergerakan pribumi terjadi (M. Joesoef dan Semaoen) yaitu mengenai perlu tidaknya ikut dalam *Comite Drukpersvrijheid* (komite kebebasan pers) (Yuliati, 2000: 79-83). M. Joesoef bekerja sebagai klerk

(juru tulis) pada Semarang *Joana Tramweg Maatschappij*. Selain aktif dalam kepengurusan *Sarekat Islam* ia juga menjadi anggota ISDV. Dalam memimpin pergerakan M.Joesoef memilih jalan tidak radikal.

M.Joesoef mengatakan, “Kalau sekarang SI begerak boeat membela M.Marco, tentoelah SI haroes Keloearkan Soeara Jang keras lagi dan tentoelah SI kelihatan benthil pada pemerintah apalagi hal tersebut di atas ini (Comite Drukpersvrijheid) sebagian jang besar dari lid-lid SI tida akan mengerti melainkan oleh lid-lid SI jang bisa toelis batja. Boeat membitjarakan politiek jang sebegitoe tinggi tentoelah kebanyakan dari lid-lid SI tida bisa mengerti dan ilanglah faedahnja pergerakan dari fihak SI halnja Drukpersvrijheid”.

Sedang Semaoen mengatakan “Soenggoehpoen fatsal 66 a dan b tadi diadakan oleh pemerintah, sebab pergerakan Hindia yang terachir-achir ini, akan tetapi dimana ada pergerakan, disitoelah ketentremen tentoe akan hilang, sebab adanja pergerakan itoe karena hilangja ketentereman. *Bergerak* dan *tentrem* adalah doea perkara jang berlawanan. Kaloe pemerintah biasa tida koeat merasakan perggerakan, itoelah menoenjoekkan kelembekan dan dengan fatsal 66 a dan b tadi maka tertindaslah pergerakan, sebab *Katentremen* atau *Stilstand van bewegin* dianggap jang baik soedah tentoe kita jang soeka madjoe, djadi bergerak, tida bisa tentrem. Kalau kita dipaksa tentrem, tentoe kita dialang-alangi dalam kemadjoean kita. Di dalam kita poenja pergerakan, bergerak, bertereak dan bersoeara, tida oesahlah kita mengeloearkan darah, tapi dalam kemadjoean kita, kita haroes mengadjak dan memberi tahoe pada sebagian jang besar dari pendoeoek, soepaja koeatlah kita.

Halnja menanam benih kebentjian dengan soerat kabar itoe tjuma dari pemandangan sadja. Anak Boemipoeta jang batja karangan-karangannja Marco, tidak brasa ditanami benih kebentjian, tapi mengapakah pemerintah sangka benih kebentjian tertanam. Pemandangan hal ini mendjadi tjoema ada di tangannja kekoeatan, dan olih karena kita anak Boemipoetra tida koeat, tentoe djoega kita poenja pemandangan akan tida berharga. Dari itoe kita mesti tjari kekoeatan dengan pergerakan (*actie en besieging*). Boeat mendjaga agar pemandangan jang geseh ini meroegikan atau mengalang-alangi kemadjoean anak Boemipoetera, baiklah fatsal 66 a dan b dihilangkan dan dibikin merdikalah anak Boemipoetera jang soeka bersoeara dan bertoelis.

Tentang menanam benih kebentjian itoelah akan tida kedjadian kalau memang tida ada dasarnja jang bisa ditanami atau bisa menimboelkan tanaman itoe. Apakah kalau Boemipoetra memberi tahoe jang atoeran padjek dan hoekoeman atas Boemipoetera dan Belanda laloe kata bahwa pemerintah tida adil lantas dipandang nanem benih kebentjian? Siapakah

jang bikin perbedaan dan menimboelkan kebentjien? Toch boekan jang tjoema memberi tahoe hal itoe dan toelis sadja?

Kalau SI bergerak hal ini laloe dikatakan bentji pada pemerintah, itoe tjoema pemandangan lain fihak sadja. Tidak koerang dan tida lebih kita minta tida dirintangi dalam kemadjoean kita dan kalau jpemerintah beri kemerdekaan bersoeara dan bertoelis pada kita, tentoelah tida ada satoe lid SI jang bentji pada pemerintah.

Halnja SI tida akan gampang mengerti, itoelah boekan soeatoe keberatan boeat minta ilangnja fatsal a dan b, sebab jang tida mengerti akan djadi mengerti kalau kita bergerak dan minta itoe. Sebaliknja kalau kita tinggal diam selamanja lid-lid SI akan tida mengerti sama sekali. Kita tida perloe toenggoe soepaja semoea orang mengerti, akan tetapi kitalah akan mengertikan dengan berdjalan. Dengan bikin pergerakan dan mempertjoekkan tida moefakat kita atas fatsal 66 a dan b tadi mendjadi pinterlah lid-lid SI dan berfaedah besarlah pergerakan kita” (Sinar Djawa,16-4-1917,No.6).

Semaoen berpendapat bahwa ps. 66 a dan b merupakan pasal yang dibuat pemerintah untuk menekan pergerakan yang ada. Penanaman kebencian melalui surat kabar merupakan sudut pandang pemerintah, sedangkan orang bumiputera yang membacanya tidak merasa ditanami benih kebencian.

Marco setelah keluar dari penjara akibat 4 artikelnja, dalam tahun 1915 dipenjara lagi selama setahun karena menyalin tulisan Dr.Tjipto Mangoen Koesoemo yang berjudul “ONZE BEWEGING” (pergerakan kita) petikan dari *De Indische Gids* (Penunjuk jalan orang Hindia) (Gie,2005:43). Tulisan ini dimuat dalam *Doenia Bergerak* dengan bahasa Belanda, oleh Marco kalimat-kalimat yang kurang terang diterangkan, juga ditambah kalimat-kalimat yang berasal dari pikiran tuan Marco sendiri. Tulisan tersebut juga menuai kritik dari sesama kaum pergerakan dalam *Goentoer Bergerak* no.22 tanggal 2 Maret 1915, dengan judul “Marco Contra Drukkerij”. Berikut salinan dalam bahasa melayu tulisan yang menyebabkan Marco terkena persdelict, “ kita menimbang ada berlainan tentang

lakoenya pemerintah. IP=Indische Partij mesti dapat poekoelan dari pemerintah sebab anggotanja (leidennja) hanja 6a7 riboe orang. Tetapi Soedaranja dapat moeka jang manies. Tjokroaminoto itoelah *sobat kerasnja* dr. Tinkes, dari itoe kedoea orang itoe dapat keoentoengan. Ini mesti diketahoei, bahwa akalnja (politiek) pemerintah bagoes=baik sekali".Red.D.B (Goentoer Bergerak,No.3,13-4-1915).

Mas Marco pergi ke Belanda setelah keluar dari penjara. Mas Marco lebih terkenal sebagai wartawan yang berani dan bandel. Setelah kembali dari Nederland Marco menulis "Sama Rata Sama Rasa" sebuah tulisan tajam bagi Belanda, akibatnya ia di penjara lagi selama satu tahun (Gie,2005:43-44). Marco tidak pernah takut untuk memberikan tulisan-tulisan yang berani, walaupun akibatnya harus terkena persdelict. Berikut pernyataan Marco mengenai persdelict dalam *Goentoer Bergerak*, "Kalau Marco president IJB tidak Moendoer dengan 46 persdelict, soedah tentoe Sr.Koornio, secretarie IJB tidak mengkirik dengan 30 of 46 persdelict. Boleh di ajoni *hoor!*", (Goentoer Bergerak,no.3,13-4-1915).

S. Partoatmodjo, *Verantwoordelijk medewerker* (pembantu yang bertanggung jawab) *Sinar Hindia*, dituntut oleh Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan pelanggaran pasal 154 "srafwetboek" pada hari Rabu 21 Mei 1919. Artikel-artikel dalam surat kabar ini yang menyebabkan ia dituntut adalah "Boeah Pikiran" yang dimuat dalam *Sinar Hindia* 14 Oktober 1916 No.206, dan "Terhadap saudara S.Tendokoesoemo" yang dimuat dalam *Sinar Hindia* 5 Desember 1919 No.224. S. Partoatmodjo adalah penganggunjawab semua artikel-artikel tersebut. Karangan pertama menyatakan bahwa pemerintah

menempuh cara untuk menambah kas negara dengan memeras rakyat. S.Partoatmodjo diputuskan mendapat hukuman 3 bulan penjara (Yuliati,2000:210-15).

Samsi seorang redaktur harian *Sinar Hindia* yang juga terjerat *Haatzaai Artikelen*. Samsi memuat suatu artikel yang berjudul *Poekoel Besi, atas nama kaoem boeroeh*. Samsi pada tanggal 5 Oktober dipanggil oleh Asisten Residen Semarang. Asisten Residen menyatakan bahwa *Sinar Hindia* semakin lama semakin kasar, dan menyatakan “Apakah *Sinar Hindia* akan berkeras terus-menerus?”. Samsi menerangkan, bahwa *sinar hindia* itu hanya menyesuaikan diri dengan aliran keadaan, “Jika keadaan kasar dan keras, maka surat kabar ini akan keras juga. Sebaliknya, jika keadaan tentram dan damai, tentulah *Sinar Hindia* akan bersikap halus dan suka berdamai”. Samsi diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Pebruari 1924 dengan tuntutan penghinaan kepada raja(Yuliati,2000:215-17).

Pers Indonesia yang anti-pemerintah memang banyak, namun tidak terarahkan, bahkan diantaran kaum pergerakan sendiri sering terjadi perang pena. Ide untuk mempersatukan mereka pernah dilakukan oleh Mas Marco pada tahun 1914, namun perkumpulan wartawan itu mati ketika ketuanya, Mas Marco dimasukkan dalam penjara.

Pemerintah Hindia Belanda memenjarakan sejumlah wartawan yang terkena pers delik dalam tahun 1919-an, keresahan ini digunakan oleh SI Semarang untuk membentuk kembali *Persatuan Wartawan Indonesia* untuk yang

kedua kalinya sebagai pengganti persatuan wartawan tahun 1915. SI Semarang menyelenggarakan pertemuan-pertemuan wartawan dari seluruh Hindia Belanda (Jawa). Hadir 32 utusan yang mewakili 13 surat kabar dan 33 wartawan mewakili majalah. Sebagai ketua sidang terpilih Tjipto Mangoenkoesoemo, yang mengusulkan dibentuknya kembali sebuah organisasi wartawan. Dalam sidang ini juga diputuskan menerima wartawan keturunan Tionghoa menjadi anggotanya. Organisasi ini diberi nama *Indiers Journalist Bond*. Susunan pengurus yang pertama adalah sebagai berikut (Gie,2005:58-59).

Ketua	: Tjipto Mangoenkoesoemo
Sekretaris	: H. Misbach (Islam Bergerak)
Bendahara	: Hardjosoemitro (Darmo Kondo)
Komisaris-komisaris	: Sosrokardono (Surabaya)
	Semaoen (Semarang)
	Agoes Salim (Jakarta)
	H. Darnakoesoemah (Bandung)

Ketidakpuasan tokoh-tokoh terhadap pemerintah Hindia Belanda baik itu mengenai peraturan yang ditetapkan maupun kebijakan yang tidak sesuai dituangkan dalam surat kabar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Akibat dari tulisan-tulisan tersebut kaum pergerakan sering dikenai hukuman dengan alasan *persdelict* atau *haatzaai artikelen*.

Haatzaai artikelen tetap diberlakukan dalam *strafwetboek* tahun 1918, dan diatur dalam pasal 154, 155, 156 dan 157. pasal 154 dan 155 dikenakan terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan

terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda. Pasal 156 dan 157 dikenakan pada siapapun yang melakukan perbuatan seperti tersebut di atas terhadap sekelompok penduduk di Hindia Belanda (Yuliati,2000:200).

Semaoen mengemukakan pendapatnya mengenai peraturan ini, dalam *Sinar Hindia* 26 Agustus 1918, “Djadi terang sekali rakjat dipaksa diam sadja meskipoen pikoelannja berat. Larangan seroepa ini menindas pemboekaan ati dan fikirannya rakjat, hingga rakjat dibikin tetap bodo sebagai sapinja kaoem oeng oleh pemerintah. Apakah dengan kelakoean ini tidak terang bahwa pemerintah mendjadi perkakas jang terbaik boeat kaoem oeng? Pemerintah djadi perkakasnja kaoem kapitaal dan mengikat demikian tali besi gerakannja rakjat, sedang pemerintah mendjalankan opendeur politiek, artinya memboeka tanah *Hindia Politiek*, artinya memboeka tanah Hindia boeat oerangnja segala bangsa jang diperoesahkan di Hindia. Dengan politik opendeur maka Hindia akan kemasoekan kapitaal asing begitoe banjak, hingga penghidoepanja anak boemi akan lebih terdesak. Desakan ini hanja bisa dikurangi kalau rakjat dibikin merdika bergerak dan hendaklah pemerintah memperkenankan rakjat memberi dorongan keras pada pemerintah dan kaoem oeng dari bangsa apa sadja, dimana perloe. Rakjat bisa beri dorongan, kalau rakjat boleh bergerak serta koeat. Bisa koeat, kalau rakjat boleh mengeloearkan hati panas jang dibikin sendiri oleh pemerintah, dan keloearnja hati panas inilah jang mempersatoekan rakjat di Hindia. Toean-toean pembatja, awas! Sebentar lagi ada anak boemi dengan sengadja mentjari pers delict, artinya dengan sengadja melanggar ketentoean-ketentoean dalam

strafwetboek, sebab hanja dengan korban jang amat banjak, rakjat akan bangoen betoel”.

Suatu karangan dalam surat kabar dinilai melanggar atau tidak melanggar hukum tergantung pada pengawasan pemerintah daerah setempat (Residen atau Asisten Residen) dan kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karena pergerakan. *Sinar Hindia* selama masa pemerintahan residen Nievwenhuis (1920-1922) tidak pernah dituntut delik pers. Presiden Semarang Nievwenhuis dalam menangani perkumpulan-perkumpulan politik revolusioner yang berpusat di Semarang tanpa kekerasan (Yuliati,2000:222-223).

Pers Indonesia pada periode tahun 1917-1930 di penuh dengan tulisan-tulisan yang mencoba memberikan jawaban atas persoalan-persoalan keburukan kondisi sosial. Sebagian ada yang menyalahkan kemajuan teknik, sebagian ada yang mengeluarkan konsepsi kejahatan moral, ada juga yang menyalahka orang Indonesia sendiri karena mereka malas dan pemboros. Pemerintah sebagai wakil kaum kapitalis membuat pasal-pasal hukum pidana bersifat karet, untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan dan para wartawan yang berani mengkritik dan mengungkapkan ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat. Pasal-pasal itu adalah 63 b dan 66 b yang dicabut pada tahun 1918, kemudian diganti dengan pasal 154 dan pasal 156. Pasal-pasal bersifat karet ini merintang jalannya pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan dengan menggunakan surat kabar sebagai sarananya, oleh karena itu para tokoh pergerakan tetap melawan tanpa peduli akibatnya (Gie,2005:25-30).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan berbagai simpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pers di Semarang tahun 1912-1930

Pers merupakan usaha orang Belanda pada awal perkembangannya, yang membawa kepentingan perusahaan dan industri minyak. Dalam perkembangan selanjutnya terbit surat kabar berbahasa Tionghoa dan Melayu-Tionghoa, isinya masih seputar kebudayaan, berita luar negeri dan hal-hal untuk kepentingan perdagangan (lihat hal.45).

Organisasi pribumi yang muncul di Semarang mendorong tumbuhnya surat kabar yang dikelola oleh anak negeri dan menjadi media pergerakan. *Sarekat Islam* memiliki *Sinar Djawa* yang dalam tahun 1918 berganti *Sinar Hindia*. *Goentoer Bergerak* terbit dalam tahun 1915 yang menjadi organ *Insulinde*. *Perhimpunan Pegawai negeri Sekolah Rendah* mempunyai surat kabar *Soeara Setalian* yang terbit pada tahun 1919. VSTP mengeluarkan surat kabarnya dengan nama *SI Tetap* pada tahun 1919, yang bertahan hingga 1925. *Nasional Indische Partij* mempunyai surat kabar *Persatuan Hindia*. Demikian juga PKI menerbitkan surat kabar bernama *API* yang terbit pada tahun 1924 dan bertahan hingga 1926.

Pers Indonesia pada periode tahun 1912-1930 banyak mengungkap tulisan-tulisan yang memberi jawaban atas persoalan-persoalan keburukan kondisi sosial. Surat kabar di kota Semarang pada periode ini, umumnya bersifat pendidikan dan propaganda.

2. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengenai pers dari tahun 1912-1930 di kota Semarang.

Tekanan terhadap pers sudah ada sejak munculnya surat kabar pertama di Indonesia “Bataviasche Nouvelles”, sebelum ditetapkannya peraturan mengenai pers. Peraturan pertama mengenai pers bersifat preventif ditetapkan dalam *Durkpers Reglement* pada tahun 1856 dan diperbarui lagi pada tahun 1906 dengan *Koninlijk Besluit* yang bersifat represif (lihat hal.51).

Pasal-pasal tersebut dilengkapi dengan *Haatzaai Artikelen* yang juga bersifat karet (bisa molor sesuai pemegangnya). Pasal-pasal hukum pidana bersifat karet dibuat untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan dan wartawan yang berani mengkritik dan mengungkapkan ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut adalah 63 b dan 66 b yang berbunyi, “ Barang siapa dengan perkataan atau dengan tanda-tanda atau dengan pertunjukan atau dengan cara-cara lainnya bertujuan menimbulkan atau menunjukkan perasaan permusuhan, benci, atau mencela diantara berbagai golongan rakyat Belanda atau penduduk Hindia Belanda akan dihukum pasal 63 b dengan

hukuman penjara 6 bulan sampai 6 tahun, pasal 66 b dengan hukuman kerja paksa diluar penjara selama 5 tahun”.

Pasal-pasal tersebut pada tahun 1918 dicabut dan diganti dengan pasal 154 dan pasal 156 yang lebih berat lagi. Pasal 154, “Barang siapa mengeluarkan pernyataan di Netherland atau Hindia Belanda, dihukum penjara atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah Belanda (Gulden)”. Pasal 156, “Barang siapa mengeluarkan pernyataan ditempat umum yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan kebencian kepada beberapa golongan penduduk Hindia Belanda, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 300 rupiah Belanda (gulden)”.

3. Perkembangan pers dalam kaitannya dengan perkembangan politik di Semarang tahun 1912-1930.

Perkembangan politik yang semakin radikal di kota Semarang, mewarnai setiap pemberitaan surat kabar yang ada. Surat kabar yang menjadi organ politik banyak memuat ide-ide, pemikiran-pemikiran dan kritik yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh pergerakan. Melalui surat kabar politik inilah dapat diketahui dinamika pergerakan politik. Surat kabar pembawa organ politik biasanya juga memuat pertemuan-pertemuan yang akan dilaksanakan oleh organisasinya. Pada saat terjadi pemogokan-pemogokan, setiap surat kabar akan memuat jalannya pemogokan, sebagai contoh: *Sinar Djawa* yang memuat undangan pemogokan percetakan G.C.T. Van Dorp.

Pertumbuhan pers yang secara tegas berpolitik akhir 1913 melahirkan kesadaran politik nasional yang baru. Istilah *Indonesische* mulai digunakan oleh seluruh perusahaan percetakan di *Weltevreden, Indonesische Drukkerij en Translaat Burreuw* (Adam,2004:297). Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia pada tahun 1928 melalui sumpah pemuda. Kematian surat kabar *Selompret Melajoe* merupakan dampak bangkitnya kesadaran politik orang Indonesia. Surat kabar milik orang Tionghoa mulai merubah liputan berita untuk mempertahankan bisnis percetakan, dan orang Tionghoa yang sadar surat kabarnya tidak bisa ditujukan kepada pembaca peranakan dan pribumi menjual mesin cetaknya (lihat hal.57).

Pendidikan merupakan salah satu kebijakan etis yang memunculkan golongan-golongan terpelajar yang aktif dalam organisasi-organisasi bumiputera seperti Darsono dan Semaoen, diantara anggota organisasi tersebut ada juga yang berprofesi dalam bidang jurnalistik, misalnya R.M Adhi Soerdjo, Mas Marco Kartodikromo dan Abdul Rivai. Kontribusi kaum pergerakan dalam menggerakkan kesadaran berpolitik masyarakat bumiputera pada masa itu tidaklah kecil. Tulisan-tulisan yang keras dan menentang keberadaan kolonialisme di Hindia Belanda dalam surat kabar perjuangan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bumiputera akan kondisi yang sebenarnya. Tulisan yang dianggap keras dan berani sering disebut dengan istilah “hantam kromo”. Kebanyakan dari tulisan itu menuai kritik, tidak hanya dari pemerintah Belanda namun juga dari rekan

seperjuangnya. Akibat dari tulisan mereka ini, banyak diantara kaum pergerakan keluar-masuk penjara dengan alasan pelanggaran terhadap undang-undang pers yang juga bersifat karet.

Pasal-pasal bersifat karet itu oleh kaum pergerakan terus dilawan, meskipun berakibat buruk bagi kaum pergerakan. Para tokoh pergerakan yang terkena pers delik akan diadili di *Raad Van Justitie Semarang*, setiap persidangan biasanya akan dihadiri para wartawan dan kader-kader politik yang belajar tentang cara berdebat dan menjatuhkan argumentasi lawan. Selama persidangan berlangsung kolom-kolom surat kabar di Semarang memuat jalannya persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang perlu disampaikan yaitu agar meningkatkan pemahaman tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, disarankan agar membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membaca surat kabar yang terbit pada masa pergerakan, agar diperoleh kebenaran mengenai sejarah pergerakan nasional yang lebih akurat dan obyektif. Banyak pelajaran dan makna dari pengalaman sejarah dari masa pergerakan nasional yang dapat dipetik sebagai sumber inspirasi dalam melancarkan pembaharuan pada masa kini demi masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam,Ahmat.2003.*Sejarah Awal Pers Dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*.Jakarta:Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu Perwakilan KITLV.
- Arifin,Anwar.1992.*Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*.Jakarta:Media Sejahtera.
- Budiarjo,Miriam.2002.*Dasar dasar Ilmu Politik*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono.2005.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Surabaya:Karya Agung.
- Brommer,B,dkk.1995.*Semarang Beeld Van een Stad*. Asia Maior:Purmerend-Nederland.
- Depdikbud.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*.Jakarta:Balai Pustaka.
- Gie,Hok,Soe.2005.*Dibawah Lentera Merah*.Yogyakarta: Bentang.
- Gottschalk,louis.1975.*Mengerti Sejarah, Pengantar Metode Sejarah*. Terjemahan:Nugroho Notosusanto.Jakarta:UI Press.
- Harahap,Krisna.2000.*Kebebasan Pers di Indonesia*.Bandung:Grafitti.
- Hardjo,Satoto.1985.*Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia:Suatu Analisa Ilmiah*.Yogyakarta:Liberty.
- Inglesion,John.2004.*Tangan dan Kaki Rakyat:Dinamika Buruh,Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial*. Ed Iskandar P.Nugraha.Jakarta:Bambu.

Joe,Liem Thian.2004.*Riwayat Semarang*.Jakarta:Hasta Wahana.

Kahin,George Mc Turnan.1995.*Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik.Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan Dan Sebelas Maret University Press.

Kartodirjo,Sartono.1968.*Lembaran Sejarah Jilid II*.Yogyakarta:Kanisius.

Kasmadi,Hartono&Wiyono.1985.*Sejarah Kota Semarang 1910-1979*.Semarang:Depdikbud.

Koesworo,Fx.Margontoro,Jb.Viko,Ronies.1994.*Dibalik Tugas Kuli Tinta*.Surakarta:Universitas Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusa Utama.

Krisniati,Harini.1997.*Kotamadya Dati II Semarang Membangun*. Semarang:PT Yandia Pratama.

Maran,Rafael Raga.2001.*Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta:PT Rineka Cipta.

Masduki.2003.*Kebebasan Pers Kode Etik dan Jurnalistik*.Yogyakarta:UUI Press.

Moedjanto.1991.*Indonesia Abad ke-20 Jilid I*.Jakarta:Kanisius.

Muhamad,Djawahir.1995. *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*.Kerja Sama Pemda Kodia Semarang – PKJT – Aktor Studio.

Oemar,Mohamad,dkk.1994.*Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta:Depdikbud.

Panitia Penerbitan Buku Ulang Tahun SPS,1971.*Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*.Djakarta:Serikat Penerbit Surat Kabar.

Philipus,Ng&Aini,Nurul.2004.*Sosiologi dan Politik*.Jakarta:PT Raja Grafindo.

- Poerwantana, Pk. 1994. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pringgodigdo. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ricklef, Mc. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- . 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Rush, Michael & Athol, Philip. 1986. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Smith, C. Edward. 1983. *Sejarah Pembentukan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soebagjo, I. N. 1976. *Sebelas Perintis Pers Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sulistyo. 1995. *Pemogokan Buruh Sebuah Bagian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Surjomiharjo, 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Surjosoempeno. 1979. *Semarang Masa Lalu-Masa Sekarang-Masa Mendatang*. Semarang: Pemkot Dati II.
- Suryadinat, Leo. 1982. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- TIM, Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Semarang. 2004. *Semarang Guide*. Semarang: Prisma Media Line.
- Tio, Jongkie. Tanpa angka tahun. *Kota Semarang Dalam Kenangan*. Sinar Indonesia: Angkatan Bersenjata Jawa Tengah-Kartika-Jawa Pos.

Yuliati, Dewi 2000. *Semarang, Pers Bumi Putra Dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera.

----- 1997. *Industrialisasi Di Semarang 1906-1930*. Dalam kongres nasional sejarah 1996. Jakarta: Depdikbud.

Wartini, Santoso. 1984. *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*. Jakarta: Perpusnas.

B. Skripsi

Nadeak, S, Putri, Agustin. 2006. *Pemogokan Buruh Percetakan NV ^{v/h} G.C.T Van Dorp & Co Semarang Tahun 1920*. Pend. Sejarah. FIS UNNES

B. Surat Kabar

Api, 6 Agustus 1925. Tidak Boleh Vergadering.

Goentoer Bergerak, No.3, 13 April. 1915. Betoel Pers Delict. Oleh Marco

Goentoer Bergerak, No.2, 6 Maret 1915. Marco Contra Drukkerij. Oleh Marco

Goentoer *Bergerak*, No.8, 17 April 1915. Pendahoeloean dan lain-lain. Oleh Sr. Koornio.

Si Tetap, No.7-8, 31 Juli dan 31 Agustus. Cabutan Hak Vergadering. Oleh Sgn.

Si Tetap, 30 Juni 1921. Hal Kritiek. Oleh S.M